

KPK CIDUK WALI KOTA MADIUN

JAKARTA, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026). Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

“Selain itu tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” ujar dia melanjutkan. Budi



Wali Kota Madiun Maidi. (ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

DPRD Gelar Rapat Paripurna, Agenda Peringatan Kabupaten OKU Timur Ke-22

“Melangkah Bersama, Maju Lebih Cepat Dalam Bingkai Kemuliaan”



Berbagai moment rangkaian kegiatan DPRD OKU Timur dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten OKU Timur. Tampak Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Hermanto, S.E., M.M. memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna ke-16. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah dengan para tamu dan undangan. Acara berlangsung sederhana, khidmat, sebagai tanda empati atas musibah banjir yang melanda OKU Timur dan daerah lainnya. (ist)



OKU TIMUR, BN - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur menggelar rapat paripurna ke 16 dengan agenda memperingati Hari Jadi ke-22 Kabupaten OKU Timur, Senin 19 Januari 2026. Peringatan kali ini mengusung tema, “Melangkah Bersama, Maju Lebih Cepat Dalam Bingkai Kemuliaan”. Rapat dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Hermanto, S.E., M.M.

PERINGATAN tahun ini berlangsung dengan suasana sederhana, reflektif, menyusul bencana banjir yang baru saja melanda sejumlah wilayah di OKU Timur pada awal Januari lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-22 kepada Kabupaten OKU Timur. Ia mengapresiasi berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih, yang menuhkan rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.

Gubernur menegaskan, bahwa capaian tersebut harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan. Memasuki tahun 2026, ia meminta agar seluruh infrastruktur yang belum selesai dapat segera dituntaskan, serta infrastruktur yang mengalami kerusakan segera direhabilitasi.

Secara khusus, Guber-

nur menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat, seperti jalan dan jembatan penghubung, agar aktivitas ekonomi, pertanian, dan distribusi hasil produksi warga dapat berjalan lebih lancar dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat OKU Timur.

Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. menegaskan bahwa peringatan hari jadi bukan hanya momentum mengenang perjalanan daerah, tetapi juga saat yang tepat untuk meneguhkan kepedulian



dan kebersamaan, terutama setelah masyarakat menghadapi ujian bencana. “Di usia ke-22 ini, kita patut bersyukur atas berbagai capaian pembangunan yang telah diraih. Namun pada saat yang sama, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang baru saja terdampak bencana banjir,” ujar Bupati.

Selama lebih dari dua

dekade, Kabupaten OKU Timur terus menunjukkan kemajuan di berbagai sektor, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, menunjukkan tren positif, hingga berbagai penghargaan tingkat nasional. Meski demikian, Bupati menekankan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses panjang

untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Bupati juga secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam perjalanan pembangunan masih terdapat kekurangan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan serta menjawab ke-

butuhan masyarakat secara lebih responsif. Perhatian khusus disampaikan terhadap banjir akibat luapan Sungai Muara Balak, Sungai Macak, dan Sungai Rengas yang terjadi pada 8 Januari 2026. Bencana tersebut mengakibatkan ribuan rumah warga tergenang, lahan pertanian terdampak, serta kerusakan pada infrastruktur dan fasilitas umum.

“Momentum hari jadi ini hendaknya menjadi pengingat bahwa kekuatan kita ada pada kebersamaan. Bukan sekadar empati dalam kata-kata, tetapi gotong royong dan langkah nyata untuk membantu pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascabanjir,” tegasnya.

Bupati mengajak seluruh elemen, mulai dari jajaran pemerintah, DPRD, dunia usaha, hingga masyarakat luas untuk memperkuat solidaritas agar proses pemulihan dapat

berjalan lebih cepat dan OKU Timur mampu bangkit kembali dengan lebih kuat.

Pada momen Rapat Paripurna tersebut, juga dilakukan penandatangan prasasti peresmian sejumlah jembatan oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru. Infrastruktur yang diresmikan meliputi Jembatan Gantung Negeri Sakti Kecamatan Cempaka, Jembatan Jatimulya II Kecamatan Madang Suku II, serta Jembatan Desa Persiapan Sukajaya-Sukamaju Kecamatan Buay Madang Timur. Keberadaan jembatan-jembatan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-22 Kabupaten OKU Timur, acara juga ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan daerah, dengan harapan OKU Timur terus tumbuh sebagai daerah yang tangguh dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

(Nelis Sri Wahyuni/Adv)



4 Mantan Bupati Sidoarjo Beri Kesaksian di PN Tipikor



Proses persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Perkara korupsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, mulai terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sidang tersebut digelar di PN Tipikor Surabaya dan menyeret empat mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Kabupaten Sidoarjo sebagai terdakwa.

Dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi kunci untuk dimintai keterangan.

Di antaranya mantan Bupati Sidoarjo Win Hendarso, periode 2000-2010. Mantan Bupati Saiful Ilah, Periode 2010-2015 dan 2016-2021. Pj Bupati 2020, Hudiyo. Serta Mantan Bupati periode 2021-2024, Gus Muhdlor. Di hadapan majelis hakim, Win Hendarso menegaskan bahwa Rusunawa Tambaksawah merupakan barang milik daerah yang berasal dari hibah pemerintah pusat. Menurut Win, karena

berasal dari hibah, rusunawa tersebut harus segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. Hal itu tetap dilakukan meski proses administrasi aset belum sepenuhnya rampung. “Rusunawa Tambaksawah itu hibah dari pemerintah pusat. Karena hibah, harus segera dimanfaatkan untuk masyarakat,” ujar Win.

Win yang menjabat Bupati Sidoarjo periode 2005–2010 itu menjelaskan, perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan Rusunawa Tambaksawah telah ditandatangani sejak 2006.

PKS tersebut kemudian diperbarui pada tahun 2010. Ia menegaskan, saat PKS itu berjalan, Sulaksono yang kini menjadi salah satu terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim CKTR. “PKS itu sudah ada sejak 2006 dan diperbarui 2010. Waktu itu Sulaksono belum menjabat sebagai kadis,” jelasnya.

Terkait penetapan aset, Win mengaku tidak mengingat secara pasti apakah pernah menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus. Na-

mun, menurutnya, penetapan aset tidak selalu harus berbentuk SK tersendiri. Penetapan dapat dilakukan melalui proses pencatatan dan pemanfaatan aset daerah.

Sementara itu, mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor dihadirkan via zoom dari lapas porong, mengaku memang mengetahui adanya PKS terbaru tertanggal 1 November 2023. Pada saat itu, Gus Muhdlor menyebut dirinya juga masih menjabat sebagai Bupati Sidoarjo.

Ia menjelaskan, PKS tersebut meneruskan pengelolaan Rusunawa Tambaksawah yang ditandatangani antara Kepala Dinas P2CKTR dengan Kepala Desa Tambaksawah. “Seingat saya, PKS ini mungkin setelah adanya acara di Kejaksaan. Namun isinya bagaimana saya lupa,” ujar Gus Muhdlor. Sedangkan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyo, yang dihadirkan via zoom dari tahanan Kejati, mengungkapkan tidak menerbitkan PKS baru selama masa jabatannya. Ia mengatakan, saat itu hanya menjalankan tugas sebagai Pj Bupati saja.

“Seingat saya tidak pernah menerbitkan perjanjian baru,” kata Hudiono.

Selanjutnya, untuk mantan Bupati Sidoarjo periode 2010–2021, Saiful Ilah, tidak dapat diperiksa kesaksiannya dalam persidangan tersebut. Hal itu dikarenakan Saiful Ilah datang terlambat saat persidangan telah dimulai.

“Saksi Saiful Ilah silakan kembali pada persidangan pekan depan untuk dimintai kesaksiannya,” ucap ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani.

Menanggapi hal itu, Penuntut Umum Kejari Sidoarjo, I Putu Kisnu Gupta, membenarkan ketidakadilan Saiful Ilah dalam pemeriksaan kali ini.

Menurut Kisnu, sebelumnya Saiful Ilah telah menyampaikan permohonan izin karena memiliki keperluan lain. “Pekan depan akan kami panggil kembali untuk dimintai kesaksian dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah,” ungkap Kisnu, Selasa (20/1).

Perlu diketahui, keempat mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo yang sedang diadili meliputi, terdakwa Sulaksono, Dwijo Prawito, Agoes Boedi Tjahjono, dan Plt Heri Soesanto. (Teddy Syah)

Jukir Sidoarjo Tanggung Sendiri Risiko Kehilangan Kendaraan



Ketua jukir, Bambang (kiri) bersama kadishub Sidoarjo, Budi Basuki (kanan) saat tinjau parkir Alun-alun. (Teddy Syah)

para jukir di lapangan. Titik krusial yang memberatkan jukir adalah tidak adanya mekanisme bantuan atau turut ganti rugi kehilangan kendaraan apabila terjadi. “Pasti suatu saat risiko itu ada. Kami menyangkan, pihak Dishub tidak akan bantu ganti ruginya,” terang Bambang, (16/1).

Selain itu, persoalan yang sering terjadi kehilangan helm. Hal itu juga jadi perdebatan antara jukir dan pengguna parkir. Menurutnya, tanggung jawab jukir seharusnya hanya menjaga kendaraan, bukan perlengkapan tambahan seperti helm atau barang lainnya di kendaraan. “Kami itu hanya menjaga kendaraan bermotornya saja, bukan barang bawaannya juga,” ujar bambang.

Ia memohon pengertian terhadap para pengguna layanan parkir, untuk turut menjaga barang bawaannya sendiri. Agar terhindar terjadinya gesekan dilapangan berkaitan kehilangan barang bawaan. Disisi lain, menurut Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki, tanggung jawab atas kendaraan parkir memang sepenuhnya berada di tangan jukir.

Ia menjelaskan, hal itu dikarenakan tidak adanya aturan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberian ganti rugi atas kehilangan kendaraan. “Di dalam aturan tidak ada ketentuan yang menyatakan kami harus turut mengganti kerugian akibat kehilangan,” “Maka dari itu, jukir wajib bekerja semaksimal mungkin sesuai kesepakatan kita,” pungkask Budi. (Teddy Syah)

Distribusi Barang Kebutuhan Masyarakat Via Kapal Roro DLU ke Banjarmasin Mulai Padat

SURABAYA, BN – Terlihat mulai Jumat malam dan Sabtu malam (16 dan 17 Januari 2026) arus truk bermuatan barang-barang kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Surabaya ke Banjarmasin yang naik kapal Roro DLU mendadak mengalami kenaikan dibandingkan Desember tahun lalu.

Kepadatan arus truk bermuatan itu, setidaknya merupakan isyarat roda perekonomian di Surabaya atau Jawa Timur mulai berputar secara normal setelah beberapa waktu ini sempat mengalami krisis hingga berdampak kepada daya beli masyarakat jadi rendah.

Truk bermuatan paling banyak ke Banjarmasin kali ini terjadi pada Sabtu malam (17/1/2026) yang naik ke kapal Roro Dharma Rucitra I, hingga antrean berjejer dua sepanjang ratusan meter dari posisi kapal sandar di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak.

Situasi arus truk bermuatan yang naik ke kapal ferry Dharma Kartika II juga tujuan Banjarmasin di Jamrud Selatan pada Jumat malam (16/1/2026) hampir menyamai banyaknya truk muatan Dharma Rucitra I Sabtu tadi malam.

Meskipun mengalami kepadatan, namun tidak terlihat sedikitpun hambatan untuk naik ke kapal-kapal Roro DLU, sebab petugas lapangan dari DLU selalu gerak cepat mengantisipasi jika terjadi kemacetan dan mengatur kelancaran truk ke kapal dengan tertib, apalagi rampdoor kapal-kapal DLU rendah hingga mendukung kelancaran naik ke kapal tersebut. Sejumlah truk tua bermuatan pun hingga mengepulkan asap tebal di darat dermaga, dengan nyaman dan lancar menaiki rampdoor yang rendah tersebut. Sopir-sopir truk kebanyakan tidak perlu melakukan tancap gas saat melintas masuk di rampdoor.

Pada Sabtu malam itu pula, terdapat kapal Roro Dharma Rucitra VII tujuan ke Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) memuat sejumlah truk bermuatan, namun tidak terlihat mobil pribadi antrean ke kapal ferry mewah milik perusahaan armada pelayaran Nasional PT.Dharma Lautan Utama berpusat di kota Surabaya tersebut. Untuk truk bermuatan



Kapal Roro Dharma Rucitra I dipadati truk bermuatan Sabtu malam. (AK)

ke NTT via kapal Dharma Rucitra VII, itu terlihat mulai banyak truk-truk besar dan panjang seiring dengan perkembangan bisnis, namun jarang terjaga oleh polisi. “Untuk kapal DLU tujuan ke NTT, penjagaan polisi secara insidental, saat diperlukan saja”, ujar seorang petugas DLU di lapangan.

Pada awal operasi trayek Surabaya – NTT PP didominasi oleh truk sedang kasis pendek dengan atap terpal berbentuk atap rumah kampung kebanyakan. Dari Waingapu, Sumba kebanyakan membawa jagung ke Surabaya.

Dengan semakin meningkatnya aneka kebutuhan masyarakat di wilayah NTT terhadap barang-barang yang sangat diperlukan di daerah masing-masing. sehingga teraspirasi membuka peluang pengadaan truk besar sekaligus sebagai langkah menghemat biaya tiket kapal Roro, dari dua menjadi satu biaya.

Seorang Polisi yang ditugaskan menjaga keberangkatan dua hari berturut-turut terhadap kapal DLU tujuan Banjarmasin tersebut turut merasa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah perlahan seraya “ngguk-nggut” berkat adanya tanda-tanda kenaikan truk bermuatan barang kebutuhan masyarakat sebagai penumpang di kedua kapal DLU yang pisah sandar di dermaga itu.

Pelayaran kapal Roro DLU tampaknya tak pernah kenal “tidur”, baik di perairan maupun di darat. Laut menangis bila tak diarungi kapal-kapal DLU. Dari berbagai jurusan silih berganti sandar dan berangkat di/dari dermaga Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak dan melakukan kegiatan bongkar muat.

Kapal DLU tujuan NTT berangkat Minggu pagi tadi diganti sandar oleh kapal Roro Dharma Ferry VII. Minggu pagi tadi DF VII menaikkan sejumlah truk bermuatan tujuan Balikpapan. “Keadaan muatannya masih stabil, belum tau kapan akan mengalami kenaikan”, sahut petugas DLU di lapangan.

Kapal ferry DLU yang lain juga terus eksis tujuan Kumai, Makassar, Lembar/Lombok, Sampit, Palu pulang pergi, semuanya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan berkantor loket di Jln.Perak Timur 512 Blok A 7-8 Surabaya. (AK/BN)

SPKT MMPP Polresta Sidoarjo Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Menpan RB



Penghargaan yang diberikan Menteri PANRB Rini Widyantini tersebut, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025.

Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing, Rabu (14/1/2026), mengucapkan terima kasih atas diberikannya penghargaan dari Menteri PANRB atas inovasi SPKT Mall Mini Pelayanan Polri Polresta Sidoarjo, sebagai Finalis Top Inovasi KIPP tahun 2025 Kelompok Umum. “Keberhasilan inovasi publik Polresta Sidoarjo tidak lepas dari dukungan serta arahan pimpinan kami Bapak Kapolri dan Kapolda Jawa Timur, Forkopimda Sidoarjo, stake holder terkait, kerja keras anggota dan kritik saran masyarakat untuk kemajuan pelayanan publik di Polresta Sidoarjo,” kata Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

Penghargaan ini menjadi capaian nasional yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan masyarakat, serta dalam upaya menjaga situasi kamtibmas Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif. Khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Peningkatan pelayanan publik lanjut Kapolresta Sidoarjo, adalah senada dengan amanat Kapolri agar seluruh jajaran tetap membumi, tetap dekat dengan masyarakat, sehingga para Kasatwil akan selalu ingat terhadap jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. (yah)

SIDOARJO, BN – Polri berkomitmen terus berinovasi meningkatkan pelayanan masyarakat. Seperti pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mall Mini Pelayanan Polri Polresta Sidoarjo. Kerja keras Polresta Sidoarjo dalam melakukan inovasi dan perbaikan pelayanan publik tersebut, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Yakni masuk sebagai Finalis Top Inovasi KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) tahun 2025 untuk kategori umum.

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK

NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/ TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN: Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : AsharAR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa, Joko Santoso. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Nino Wiwantara. BLITAR : Budi Sastro. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto, PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDO : Agung Chornelis (Kabiro), Hari Sulisty. BONDOWOSO : Rukwandanu. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Sriptio, Sugeng Purnomo. JAWA TENGAH : BLORA : Mugiarto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. REMBANG: Didik Eko Sulistiwan. WONOGIRI : Heryanto. SEMARANG RAYA : Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo. PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOYOLALI : Ahmad Mukhlis (Kabiro). TEMANGGUNG : Novan Argunanto. JAWA BARAT : CILACAP : Eko Prionggo Dewo, Suyatno. MAGELANG: Marno, ST. BANDUNG : Zaenal Ikhsan (Kabiro). CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN : Asep Sujana, Karsono. SUMEDANG: Ernawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN: Edwar Panata Muda. PURWAKARTA: Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG: Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Edy Suspi AB. SULAWESI UTARA : Hilda Pusung. MANADO: Affandi Masloman. KOTAMOBAGU/BMR : Arman Muna (Kabiro), Moh Seto Wanoto. GORONTALO : Rifly Tama'un. SULAWESI BARAT : Andi Firmansyah. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA: Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : Sofyan Hadi. KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro). KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN: Handoko KEP NATUNA: Amir Hamzah. RIAU: Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Yanthi Mahameru. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, OKU TIMUR : Nellis Sri Wahyuni. OKI : Nurlis Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN: Muhammad Syaifei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumanggor (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames, Faoziduhu Hulu. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution. SUMATERA BARAT : PASAMAN: Suryadarma (Kabiro), Refdinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari. LAMPUNG SELATAN: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESIRIS BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro), Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bando, PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDO : Agung Chornelis (Kabiro), Hari Sulisty. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. TEBO : Wendri Putra Rezky. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM: Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati. PEMASARAN/ADMINISTRASI/ KEUANGAN: Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Presiden Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang

MALANG, BN – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendampingi kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang pada Selasa, (13/1). SMA Taruna Nusantara Kampus Malang ini memiliki luas 30 hektare (Ha) yang dibangun saat Bapak Prabowo menjabat Menteri Pertahanan.

SMA Taruna Nusantara dirancang dengan fasilitas modern untuk menunjang seluruh aspek kehidupan siswa (Taruna), yakni gedung pendidikan dilengkapi teknologi pembelajaran terkini, asrama ksatrian yang nyaman dan fasilitas olahraga.

Selain itu, pusat layanan siswa atau Taruna Nusantara Center seperti Advance Study Center (ASC) dan English Study Center (ESC). Gubernur Khofifah mengatakan kehadiran SMA Taruna Nusantara mendukung program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah berasrama unggulan untuk membentuk pemimpin berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

“Pentingnya sekolah taruna dalam membangun karakter dan prestasi akademik siswa, serta mendorong taruna untuk menjadi generasi unggul, garda terdepan penjaga NKRI,” ungkapnya.

Menurut Khofifah, SMA Taruna Nusantara menawarkan lingkungan belajar yang asri dan representatif untuk mendukung kegiatan akademik serta pembinaan karakter siswa.

Melalui Kurikulum terintegrasi, sistem pendidikan tidak fokus pada kecerdasan akademik (Kurikulum Nasional), tetapi juga penguatan karakter melalui Kurikulum Khusus yang meliputi wawasan kebangsaan, kepemimpinan dan kemandirian. “Pembinaan karakter dan akademik diberikan



Presiden Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. (ist)

dan tidak bisa dipisahkan dalam sistem pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Pola sistem pembinaan pendidikan mengutamakan pembentukan karakter bagi para siswa, beriringan dengan peningkatan prestasi akademi, menjadi satu bagian yang utuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan SMA Taruna Nusantara menjadi wadah siswa untuk terus bertumbuh, belajar dan berkarya

sehingga meningkatkan kompetensi dan skill mereka yang akan menjadi pemimpin di Indonesia Emas 2045.

“Mudah-mudahan semua peserta didik dapat mengemban mandat menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah saat Indonesia Emas 2045, pemimpin emasnya dari siswa-siswi Jawa Timur,” ungkapnya.

Khofifah berpesan kepada seluruh siswa-siswi untuk terus menjaga prestasi, menjaga kemampuan yang sudah dimiliki agar terus dikembangkan guna meraih prestasi setinggi-tingginya. “Teruslah meraih prestasi, berikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. Negeri ini tidak hanya butuh generasi pintar, tapi generasi pintar dan benar,” ungkapnya.

Setelah meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Gubernur Khofifah bersama Presiden Prabowo meninjau sarana prasarana. Dilanjutkan foto bersama siswa siswi SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.

Di sisi lain, dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, pendidikan dan kesehatan adalah instrumen membangun, kesejahteraan, demokrasi, pendidikan dan menghilangkan kemiskinan.

“Saya bangga hari ini melihat hasil kita dan dengan mengucapkan bismillah siang ini saya Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara kampus malang,” ungkapnya. (dji)

Kades Drancang Titip Aspirasi Bedah Rumah untuk Warga Kurang Mampu



Rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. (Subhan Arif)

GRESIK, BN – Sabtu (03/01/2026), Kepala Desa Drancang, M. Nastain, terlihat sedang mengamati dengan seksama proses pembangunan di depan pintu gerbang Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD Negeri 219 Gresik. Kehadiran sosok kades yang dikenal dekat dengan awak media ini ti-

dak hanya untuk memantau perkembangan infrastruktur di wilayahnya, namun juga membawa misi kemanusiaan.

Dalam kesempatan tersebut, M. Nastain menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi salah satu warga bernama Pak Umbar. Meskipun secara administra-

tif Pak Umbar merupakan warga desa tetangga yang berbatasan langsung dengan Desa Drancang, kondisi tempat tinggalnya sangat memprihatinkan dan memerlukan penanganan segera.

“Kami sangat berharap Pak Umbar bisa mendapatkan bantuan bedah rumah dari program pemerintah, apapun namanya. Kondisinya memang layak mendapatkan perhatian,” ujar M. Nastain di hadapan awak media.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, rumah yang dihuni Pak Umbar saat ini dalam kondisi tidak layak huni. Ironisnya, jika hujan turun, rumah

tersebut bocor parah hingga tidak dapat ditempati untuk berteduh.

M. Nastain berharap peran media dapat membantu memfasilitasi aspirasi ini agar sampai kepada pihak terkait atau instansi yang berkompeten. Hal ini diharapkan dapat memicu respons cepat dari pemerintah daerah maupun dinas sosial guna memberikan hunian yang lebih layak bagi Pak Umbar.

“Kehadiran rekan-rekan media diharapkan bisa menjembatani aspirasi ini agar segera ada tindakan nyata dari pihak berwenang, mengingat faktor cuaca yang tidak menentu saat ini,” tutupnya. (Subhan Arif)

Tingkatkan Ekonomi Warga, Pemdes Semawot Tuntaskan Pembangunan Jalan Aspal Hotmix

BOJONEGORO, BN – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur di tingkat desa. Salah satunya direalisasikan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Semawot, Kecamatan Sukosewu, yang sukses memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk pembangunan jalan aspal hotmix guna memperlancar mobilitas warga.

Pembangunan jalan jenis AC/WC tersebut membentang sepanjang 407 meter dengan lebar 4 meter. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp846.305.708 (Delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025.

Pembangunan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat. Dar, salah satu warga Desa Semawot, mengungkapkan rasa syukurnya atas perbaikan jalan tersebut. Menurutnya, akses jalan yang mulus sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari.

“Kami sangat senang dengan dibangunnya jalan



Pemerintah Desa Semawot, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk pembangunan jalan aspal hotmix. (pri)

aspal ini karena mempermudah aktivitas warga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Desa Semawot, khususnya Bapak Kepala Desa yang telah membangun jalan desa kami,” ujar Dar saat ditemui di lokasi.

Sementara itu, Kepala Desa Semawot, Mujiyanto, saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (26/01/2026), membenarkan bahwa

pengerjaan aspal tersebut telah selesai seratus persen. Ia menjelaskan bahwa meski sempat ada kendala teknis akibat faktor cuaca, namun semua sudah teratasi dengan baik.

“Alhamdulillah, pembangunan jalan aspal AC/WC sudah rampung dikerjakan dengan baik. Memang kemarin ada sedikit kendala (hasil) kurang bagus dikarenakan saat pengerjaan turun hujan deras. Namun, kini semuanya sudah diperbaiki dan diselesaikan sesuai harapan masyarakat Semawot,” ungkap Mujiyanto.

Dengan selesainya pembangunan infrastruktur jalan ini, diharapkan dapat mendorong roda perekonomian warga Desa Semawot serta memperlancar akses transportasi antar wilayah di Kecamatan Sukosewu.

Kelurahan Kedundung Gelar Musrenbang, Yayasan Urun Rembuk



Kelurahan Kedundung kecamatan Magersari Kota Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2027, Senin (19/1/2026).

KOTA MOJOKERTO, BN – Dalam rangka persiapan pembangunan jangka panjang Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan tahun 2027. Kelurahan Kedundung kecamatan Magersari Kota Mojokerto menjadi salah satu wilayah

yang pertama melaksanakan agenda tersebut sebagai forum penjaringan aspirasi masyarakat, Senin (19/1/2026).

Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari SE, membuka langsung Musrenbang di Kelurahan Kedundung dan sekaligus menegaskan pentingnya peran aktif warga dalam menentukan arah pembangunan.

Menurut Ning yang merupakan walikota Mojokerto perempuan pertama di kota Mojokerto tersebut menyatakan bahwa musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil di lingkungan masing-masing.

“Musrenbang ini adalah media partisipasi masyarakat. Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran, dan itu hanya bisa dilakukan jika masyarakat menyampaikan kebutuhannya secara langsung,” kata Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Dalam forum tersebut Ning Ita menjelaskan, seluruh usulan pembangunan tahun 2027 harus mengacu pada tema pembangunan Kota Mojokerto, yakni peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial budaya melalui daya saing sektor unggulan daerah. Tema tersebut ditetapkan agar arah kebijakan pembangunan di seluruh kota selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

Ia memaparkan, terdapat tiga fokus utama dalam tema pembangunan tersebut, yakni penguatan ketahanan ekonomi, penguatan sosial budaya, serta peningkatan daya saing sektor unggulan. Hal ini dinilai penting di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global yang turut berdampak pada perekonomian nasional.

Selain ekonomi, penguatan sosial budaya juga menjadi perhatian. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial dinilai sebagai modal utama masyarakat Kota Mojokerto untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi.

Lebih lanjut, Ning Ita menyebutkan tiga sektor unggulan Kota Mojokerto yang perlu terus diperkuat, yakni sektor industri kecil menengah (IKM) seperti alas kaki, sektor industri kreatif, serta sektor jasa dan pariwisata berbasis sejarah dan budaya.

Ia menekankan, usulan yang disampaikan masyarakat harus disusun secara prioritas dan realistis, menyesuaikan dengan sembilan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta kemampuan anggaran kelurahan. “Pilih usulan yang paling dibutuhkan dan paling prioritas bagi masyarakat. Jangan hanya banyak, tetapi harus bisa direalisasikan,” katanya.

Menutup sambutannya, Ning Ita berharap Musrenbang benar-benar dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warga. Dengan partisipasi aktif masyarakat, ia optimistis pembangunan Kota Mojokerto dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, “Silahkan sampaikan kebutuhan masing-masing lingkungan, dan harus pada prioritas pembangunan tahun 2027,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Mohammad Mostofa yang akrab cak Tofa selaku sekretaris Yayasan Penyejuk Jiwa Mojokerto yang berada di lingkungan Balongrawe Kedundung, urun rembuk sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian pembangunan, karena sebagian warga Balongrawe belum bisa berkontribusi melalui pajak bumi.

“Kami sangat berharap surat kami segera di akomodir, di respon dan ada lanjutnya, surat pengajuan kami,” harap cak Tofa. Hadir dalam kegiatan itu Camat Magersari, Setiyo Budi Utomo kepala kelurahan Kedundung, DR, Aan Puji Kistanto, SH, MH dan beberapa tokoh mulai RT dan RW. (Husnan)

Peringati Isra’ Mi’raj, Pemdes Pancur Hadirkan KH Ali Mahsun dalam Pengajian Umum



Kepala Desa Pancur, H. Lulus Pujiono saat memberikan sambutan di acara pengajian umum di pendopo Balai Desa Pancur. (pri)

BOJONEGORO, BN – Pemerintah Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, menggelar peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Acara pengajian umum ini dilaksanakan di pendopo Balai Desa Pancur pada Minggu, 18 Januari 2026, dan dihadiri secara antusias oleh ratusan warga setempat. Acara diawali dengan pembacaan khotmil khotmil Qur’an dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Pancur, H. Lulus Pujiono.

Dalam sambutannya, Lulus Pujiono mengajak seluruh hadirin untuk menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustad KH Ali Mahsun dengan sebaik-baiknya. Ia menekankan pentingnya mendengarkan ceramah tersebut untuk menambah bekal dalam kehidupan sehari-hari dan meneladani sikap serta perbuatan mulia Nabi Besar Muhammad SAW. “Apa yang disampaikan Ustad Ali Mahsun mari kita dengarkan tausyiahnya dengan baik, untuk menambah bekal dalam kehidupan sehari-hari, dan meneladani sikap serta perbuatan mulia, seperti Nabi besar Muhammad SAW,” ujarnya.

Pengajian umum ini tampak luar biasa dengan antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Pancur yang mendengarkan dengan khidmat.

Turut hadir dalam acara tersebut tokoh agama setempat, Kiyai Roqif, yang dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Muksin di Desa Pancur. Acara ini terselenggara berkat dukungan penuh dari para tokoh agama, ulama, dan umarok (pemerintah), sebagai upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat yang agamis di Desa Pancur. (pri)

Kades Sukendah Tekankan Berbaur Dengan Masyarakat Guna Serap Aspirasi

GRESIK, BN – Kepala Desa (Kades) Sukendah dari Mojosarijejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menekankan pentingnya berbaur dengan masyarakat guna menyerap aspirasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Dalam bincang ringan di ruang kerjanya, Selasa (6/01/2026), Kades Sukendah menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah meningkatkan kinerja tim dengan pelayanan prima dan maksimal sesuai kebutuhan publik atau warga penduduk desa, terutama dalam bidang administratif.

“Dengan berbaur ketengah-tengah masyarakat melalui berbagai macam program kegiatan, kita dapat menyerap aspirasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Kades Sukendah.

Kades Sukendah juga menegaskan bahwa ideologi yang dipegangnya dalam penyelenggaraan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan/atau bernegara adalah Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD’45. “Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Kades Sukendah. (Subhan Arif)



Kepala Desa Sukendah. (Subhan Arif)

Diskominfo Pamekasan Gelar Kegiatan Rencana Anggaran Kemitraan Dengan Media Tahun 2026

PAMEKASAN, BN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Pamekasan menggelar kegiatan Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA) sekaligus menjalin kemitraan dengan media pada tahun 2026 yang berlangsung di ruang TIK Diskominfo kabupaten Pamekasan, Senin (12/1/2026).

Dalam sambutannya kepala Diskominfo Pamekasan Muttaqin, S.Sos, Msi melalui Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Arif Rachmansyah S.STP, Msi menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan anggaran Diskominfo tahun 2026 dengan program strategis pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara Diskominfo dengan insan



Kabid informatika dan komunikasi publik (KIP) Arif Firmansyah S.STP, M.Si saat memberikan sambutan. (kholis)

nikasi publik, pengelolaan informasi, penguatan layanan teknologi informasi, serta strategi publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan melalui kemitraan media.

(kholis)

media dalam mendukung penyebaran informasi publik yang akurat, transparan dan berimbang.

"Kami harap dengan kerjasama yang terjalin ini dapat mewujudkan kemitraan dan hubungan kerjasama yang berkualitas, profesional dan profesional dengan media," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Diskominfo Pamekasan juga memaparkan rencana pelaksanaan anggaran yang mencakup program komunikasi publik, pengelolaan informasi, penguatan layanan teknologi informasi, serta strategi publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Pamekasan melalui kemitraan media.

Advokat Suripto, SH. Apresiasi Kinerja Kapolres Banyuwangi



Suripto, S.H., (kanan) & Partners. (Dj)

BANYUWANGI, BN - Kinerja Polresta Banyuwangi di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra selama 1 tahun 3 bulan terakhir mendapat apresiasi tinggi dari kalangan praktisi hukum di Kabupaten Banyuwangi.

setinggi-tingginya kepada Kombes Pol. Dr. Rama Samtama Putra selama menjabat Kapolresista Banyuwangi. Dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan, situasi ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga aman dan kondusif," ujar Suripto kepada

bidiknasional.com, Senin (19/1/2026).

Menurut Suripto, keberhasilan ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas yang dibangun oleh Kapolresta. "Ini semua berkat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antar unsur TNI, Polri, Pemkab Banyuwangi, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan, LSM, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi," tambahnya.

Atas mutasi jabatan tersebut, Suripto juga mendoakan kesuksesan bagi Kombes Pol Rama di tempat tugas yang baru. "Selamat bertugas Komandan sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua," ucapnya.

Selain memberikan apresiasi kepada pejabat lama,

Suripto menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Kapolresta Banyuwangi yang baru, Kombes Pol. Dr. Rofiq Ripto Himawan. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan tren positif dalam menjaga stabilitas daerah. Pihaknya siap mendukung program-program kerja Polresta Banyuwangi kedepan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan ketertiban masyarakat.

"Kami mendukung penuh Kapolresta Banyuwangi yang baru, Kombes Pol. Dr. Rofiq Ripto Himawan. Harapan kami, Kabupaten Banyuwangi tetap terjaga aman dan kondusif di bawah kepemimpinan beliau. Selamat datang dan selamat bertugas Komandan di Polresta Banyuwangi," tutup Suripto.

(Dj)

Mencuri di Terminal, Warga Sukorejo Ditahan di Polres Bondowoso

BONDOWOSO, BN - IM (35 tahun), warga jalan Kawah Ijen, Dusun Sukorejo Lor, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, diketahui telah ditahan di Rutan Polres Bondowoso sejak 26 Desember 2025.

Pria yang juga pernah menghabiskan masa kecilnya di Dusun Tegal Ampel, RT 18/RW 04, Desa Tegal Ampel, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso ini, menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan tindakan pencurian yang terjadi di sekitar Terminal Bondowoso.

Terduga pelaku dijerat berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian. Penetapan pasal itu, disesuaikan dengan dugaan perbuatan yang dilakukan oleh IM.

Dari tangan pelaku, Penyidik Polres Bondowoso telah menyita beberapa barang bukti antara lain 1 unit ponsel Samsung Galaxy A12 warna hitam dengan nomor IMEI 354668775845452 dan 358183415845454, kemudian 1 buah dusbook handphone, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi P 5682 AY beserta kuncinya.

Kasi Humas Polres Bondowoso, Iptu Bobby Dwi Siswanto, mengkonfirmasi bahwa proses penyelidikan terhadap kasus itu terus berlanjut hingga tahap pemeriksaan tersangka (P 21). Kendati demikian, hingga saat ini belum ditemukan tersangka lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Untuk proses, terus berlanjut sampai P 21. Untuk tersangka lain, sampai saat ini belum ada. Pasal yang dikenakan sesuai dengan perbuatan pencurian. Tersangka sekarang ditahan di Mako Polres Bondowoso sekitar bulan Desember 2025," ujar Iptu Bobby. Jumat, (16/1/2026).

Dalam pernyataan berikutnya, Iptu Bobby menjelaskan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso (tahap 1), untuk dilanjutkan proses hukumnya.

Menariknya, sebelum kasus menggegerkan di Terminal Bondowoso muncul, IM juga pernah diduga melakukan aksi pencurian di kawasan pertigaan lampu merah Desa Kapuran, Kec Wonosari, pada Sabtu (10/5/2025) silam.

Ketika itu, IM disinyalir menjarah tabung gas ukuran 3 Kilogram yang diangkut sopir dan kenek truk muatan LPG. Namun, tindakan tersebut berhasil digagalkan oleh korban, kala mengetahui ulah pelaku saat mereka berhenti menunggu lampu hijau menyala. Dari peristiwa ini, IM langsung dikerel dan dijebloskan di sel tahanan Polsek Wonosari



Tersangka IM (35 tahun)

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tak cukup sedemikian itu, IM juga pernah diduga mencuri HP Oppo A18 warna biru milik warga Situbondo pada Selasa (29/4/2025), di sekitar pekarangan rumah korban.

Korban dalam kasus dugaan pencurian handphone di Situbondo, mengungkapkan bahwa pada awalnya ia berniat melaporkan IM ke pihak berwajib, namun membatalkannya setelah mengetahui istri pelaku sedang hamil. IM selanjutnya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

"Waktu itu niat saya memang mau melaporkan pelaku, namun karena IM bilang istrinya hamil, akhirnya niat itu saya batalkan. IM juga mengaku telah menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi. Tapi sekarang, saya meyakini itu hanya modus. Dengar IM ditahan, saya berencana akan melaporkannya juga, mengingat dugaan perbuatan pencurian yang berulang," katanya. Sabtu, (17/1/2025).

Di lain tempat, warga Bondowoso mengungkapkan harapan agar kasus tersebut dapat diselidiki secara tuntas dan terduga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menurut warga, hal ini diharapkan supaya dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat serta memberikan efek jera bagi siapa saja yang mungkin memiliki niat serupa.

Tidak hanya itu, mereka juga mengapresiasi kerja keras Polres Bondowoso dalam mengungkap kasus kriminal tersebut dan meminta proses hukum dapat berjalan dengan adil serta transparan.

(agung cornelis)

Wisata Sumenep Jadi Target Para Turis Manca Negara



Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo. (ist)

langsung kepada warga. Maka dari itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mensukseskan program Pemerintah di bidang wisata .

Dan untuk setiap event yang masuk dalam kalender 2026 disusun berdasarkan potensi lokal dan karakter budaya Sumenep. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang besar bagi masyarakat untuk terlibat, baik sebagai pelaku seni budaya, penyedia jasa, maupun pemuda berkreatif bisa mengambil hikmahnya. sehingga event-event ini benar-benar hidup karena masyarakatnya terlibat langsung. Wisatawan datang bukan hanya melihat keadaan atau kenyamanan tapi merasakan adat budaya yang berbeda dari daerah lainnya.

Lanjut Bupati Ahmad Fauzi, memberikan semangat pada masyarakat di kepulauan, seperti Gili Iyang dan Kangean, untuk terus menjaga semangat kolaborasi dalam setiap event yang digelar. Keberhasilan festival budaya dan sport tourism di wilayah tersebut menjadi bukti bahwa partisipasi warga mampu mendorong pemerataan ekonomi berbasis wisata di kota keris.

Pada tahun ini (2026) Pemkab Sumenep telah menyiapkan sekitar 110 agenda unggulan dengan konsep yang lebih ramah wisatawan dan berbasis komunitas. Pemerintah berharap kalender event ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap sektor pariwisata daerahnya sendiri.

Maka dengan adanya kolaborasi pemerintah dan masyarakat Sumenep mampu tampil sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional. Ia menutup dengan ajakan agar seluruh warga menjadikan kalender event 2026 dalam kebangkitan ekonomi dan promosi budaya Sumenep ke tingkat nasional. (yus)

Bupati Cup IX Turnamen Futsal HUT ke-34 SMK Yosonegoro Digelar



tamu undangan lainnya yang memadati Gedung Olahraga Kimagety Magetan.

Sebelum pembukaan diawali dengan koreografi para siswa-siswi memperagakan tarian massal yang memukau para penonton dan undangan yang hadir.

Ketua ketua pelaksana kegiatan turnamen menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan turnamen termasuk pertanggung jawaban.

Bupati Nanik Sumantri memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana kegiatan ini dan sebelumnya beliau pun dalam sambutan nya bahwa pada hari kita semua yang hadir hari ini merupakan bentuk solidaritas sehingga Kita bisa berkumpul di gedung ini.

"Kegiatan ini seperti ini merupakan kegiatan yang positif melainkan juga merupakan jalinan silaturahmi dan kegiatan yang bisa menumbuhkan sportifitas dalam olahraga untuk setiap peserta," ucap Nanik Sumantri.

Sementara, Amin Kepala SMK Yosonegoro saat diwawancarai, mengatakan bahwa kegiatan turnamen ini dilaksanakan dalam rangka HUT Ke-34 SMK Yosonegoro, dimana dalam turnamen futsal diikuti 23 tim tingkat SLTA Se-kabupaten Magetan.

"Pelaksana kegiatan HUT di awali pada hari Senin kemarin (12/1) dan penutupannya sampai hari Sabtu malam (17/1) dan sebelum di tutup, penyerahan hadiah/piala bagi para juara di GOR Kimagety yang juga dihadiri langsung oleh Kapolres Magetan," ucap Amin.

Akhir kata, Amin pun mengutarakan selain olahraga futsal juga ada VOLLY Ball yang dilaksanakan di SMK Yosonegoro dan juga perlu diketahui jumlah siswa-siswi SMK Yosonegoro ada 1800 siswa dan terbagi dalam 8 jurusan. (Ashar)

Pimpin SDN 155 Gresik, Kasek Baru Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Karakter Religius



Muslimin Kepala Sekolah SD Negeri 155 Krikilan, Driyorejo, Kabupaten Gresik. (Subhan Arif)

religiusitas sebagai tenaga pendidik, yakni ajang silaturahmi, akan membawa keberkahan. Selain itu, tuntutan profesionalitas harus digenapi dengan menjalin kemitraan yang komplementer dengan seluruh pihak," ujar Muslimin kepada awak media.

Terkait latar belakang pendidikannya yang spesifik di bidang agama, Muslimin menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga semangat nasionalisme di lingkungan sekolah. Berbekal pengalaman menghadapi kompleksitas keberagaman di tempat tugas sebelumnya, ia optimis mampu membawa UPT SDN 155 Gresik menjadi lembaga yang religius namun tetap berjiwa kebangsaan.

"Meski latar belakang saya adalah pendidikan agama, penguatan nasionalisme tetap menjadi prioritas. Kami akan mengemas program-program sekolah dengan nuansa agamis yang inklusif, sehingga nilai-nilai cinta tanah air tetap terjaga di tengah keberagaman yang ada," pungkasnya. (Subhan Arif)

GRESIK, BN - Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD Negeri 155 Krikilan, Driyorejo, Kabupaten Gresik, resmi memulai babak baru di bawah kepemimpinan Muslimin, S.Pd. Sabtu (17/01/2026) menjadi hari pertama bagi sosok pendidik asal Pasuruan ini menjalankan tugasnya sebagai Kepala Sekolah (Kasek) di lembaga pendidikan tersebut.

Saat ditemui di ruang kerjanya, Muslimin memaparkan visi kepemimpinannya yang menitikberatkan pada keseimbangan antara profesionalitas kerja dan nilai-nilai religius. Sebagai lulusan Sarjana Pendidikan Islam, ia meyakini bahwa penguatan silaturahmi merupakan kunci utama dalam membangun lingkungan sekolah yang harmonis.

"Kami berharap implementasi dari kompetensi religiusitas sebagai tenaga pendidik, yakni ajang silaturahmi, akan membawa keberkahan. Selain itu, tuntutan profesionalitas harus digenapi dengan menjalin kemitraan yang komplementer dengan seluruh pihak," ujar Muslimin kepada awak media.

Terkait latar belakang pendidikannya yang spesifik di bidang agama, Muslimin menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga semangat nasionalisme di lingkungan sekolah. Berbekal pengalaman menghadapi kompleksitas keberagaman di tempat tugas sebelumnya, ia optimis mampu membawa UPT SDN 155 Gresik menjadi lembaga yang religius namun tetap berjiwa kebangsaan.

"Meski latar belakang saya adalah pendidikan agama, penguatan nasionalisme tetap menjadi prioritas. Kami akan mengemas program-program sekolah dengan nuansa agamis yang inklusif, sehingga nilai-nilai cinta tanah air tetap terjaga di tengah keberagaman yang ada," pungkasnya. (Subhan Arif)

Mediasi Nasabah Koperasi BMT Mina Lanna Tertutup, Disperindagkop Kota Pekalongan Jadi Sorotan



Supriyo PLT Disperindagkop dan Hepi Sekretaris Disperindagkop di wawancara awak media setelah selesai Audensi (Foto: Dikin/BN)

KOTA PEKALONGAN, BN – Puluhan nasabah Koperasi BMT Mina Lanna yang didampingi dari Kantor Hukum Didik Pramono, S.H. & Partners mengikuti mediasi dengan pengurus koperasi yang difasilitasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan, pada hari Senin (12/1/2026) siang dimulai sekitar jam 10 WIB (waktu Indonesia Barat). Mediasi berlangsung dilakukan secara tertutup di aula kantor dinas setempat bahkan awak mediapun

dilarang mengikuti jalannya audensi tersebut.

Sejumlah pihak yang tidak berkepentingan, termasuk awak media, diminta meninggalkan ruangan selama proses mediasi yang berlangsung hampir satu jam tersebut.Sebelum mediasi dimulai, beberapa nasabah menyampaikan keluhan terkait lambannya penyelesaian masalah simpanan yang hingga kini belum cair. Salah satunya, Nasrurohman (43), warga Medono, mengaku mengalami

kerugian sekitar Rp13 juta. “Selama ini kami sudah bersabar. Harapannya, hak kami bisa dikembalikan seutuhnya,” ujamya.

Keluhan serupa disampaikan oleh Esti Triyana (38), warga Medono, yang berpeparan sebagai kolektor tabungan warga. Ia mengutarakan, sedikitnya 95 orang menabung melalui dirinya. “Saya pusing dikejar para nasabah. Saat Lebaran kemarin sudah terbayar Rp50 juta dan langsung saya bagikan, tapi masih kurang sekitar Rp90 jutaan,” keluhannya.

Usai mediasi, PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan, Supriono, mengatakan bahwa pertemuan tersebut mulai menemukan titik terang. Ia menyebutkan, permasalahan ini berawal dari kesalahpahaman penerapan standar operasional prosedur (SOP) oleh manajemen koperasi. “Pengurus sudah meng-

hitung dana dari pinjaman dan aset sekitar Rp6,7 miliar. Dana tersebut diharapkan bisa menutup simpanan para nasabah,” ungkap Supriono.

Menurutnya, pihak pengurus akan segera menagih para peminjam agar dana dapat dikembalikan kepada para nasabah. “Semoga proses ini berjalan lancar dan secepatnya bisa diselesaikan,” terangnya.

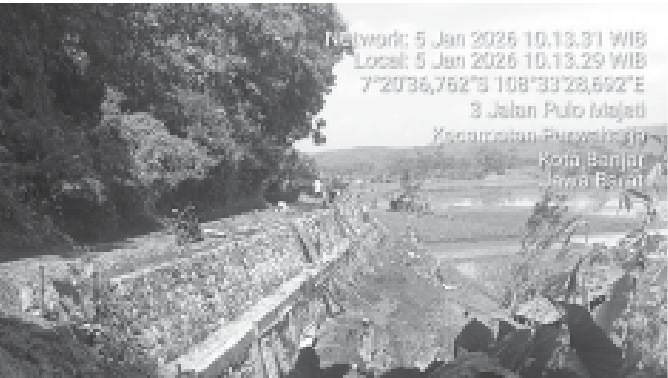
Sementara itu, kuasa hukum nasabah, Didik Pramono, S.H., menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pengurus dan nasabah agar tidak ada yang dirugikan. “Sebanyak 19 orang telah memberikan kuasa kepada kantor hukum kami. Kami berharap komunikasi berjalan lancar. Kami juga mengapresiasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan yang telah memfasilitasi mediasi ini agar tercapai kesepakatan,” ujar Didik Pramono, S.H. (Dikin)

Penanganan Bencana BBWS Citanduy, Amankan Irigasi dan Lahan Pertanian di Pulomajeti

BANJAR, BN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy melalui Satker SDA OP 3, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ijang, melaksanakan penanganan bencana berupa pemasangan Tembok Penahan Tebing (TPT) di Pulomajeti, Kelurahan Purwaharja, Kec Purwaharja, Kota Banjar.

Pekerjaan tersebut meliputi pemasangan TPT dengan tinggi 3 meter dan panjang 59 meter. Penanganan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengamankan saluran irigasi agar tidak jebol serta melindungi lahan pertanian milik petani dari ancaman longsor.

Pelaksanaan pekerjaan dikerjakan oleh pengusaha asal Banjar, Haji Jalal, yang dinilai sigap dan responsif dalam melaksanakan kegi-



Tembok Penahan Tebing di Pulomajeti, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. (asep)

atan penanganan bencana dari BBWS Citanduy. Dalam pelaksanaannya, pelaksana lapangan dan pengawas Yoga Hadimaulana S.T terlihat bersinergi dengan baik serta menjalankan pekerjaan sesuai instruksi PPK.

PPK SDA OP 3 BBWS Citanduy, Ijang, menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian

dari upaya cepat tanggap pemerintah dalam mengantisipasi kerusakan infrastruktur irigasi di wilayah rawan bencana. “Penanganan ini kami lakukan untuk mengamankan saluran irigasi agar tidak jebol serta melindungi lahan pertanian masyarakat. Alhamdulillah, pelaksana dan pengawas bekerja sesuai arahan dan

spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” ujar Ijang.

Manfaat dari pembangunan TPT tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang petani setempat mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BBWS Citanduy, PPK, dan tim pelaksana. Dengan adanya TPT ini, lahan pertanian kami sekarang lebih aman dari longsor,” tuturnya.

Pada saat ini pekerjaan masih dalam tahap finishing, diharapkan saluran irigasi di wilayah Pulomajeti tetap terjaga dan keberlangsungan lahan pertanian masyarakat dapat terlindungi secara berkelanjutan.

(Asep Sujana)

PT GBS Minta Ketegasan UPP Kelas III Batang Berantas Dugaan Sumur Bor Ilegal

BATANG, BN – Perusahaan penyedia air bersih dari PT. Global Berkah Segera (GBS). Menggelar audiensi dengan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Batang, Pada hari Kamis (15/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), di Kantor UPP Batang, Jawa Tengah. Audiensi tersebut didampingi kuasa hukum Didik Pramono, S.H., serta dihadiri agen kapal niaga dan perwakilan BPI PLTU Batang.

Dalam audiensi tersebut, Hery Prasetyono selaku Direktur PT. GBS menyoroti dua persoalan utama. Pertama, status legalitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Batang. Kedua, dugaan adanya sumur bor ilegal yang digunakan untuk pengisian air bersih ke kapal-kapal di kawasan PLTU Batang dan Pelabuhan Batang.

Ia menyampaikan bahwa hasil audiensi belum sepenuhnya sesuai harapan. Ia menegaskan bahwa PT GBS merupakan perusahaan resmi yang hanya tinggal melakukan perpanjangan izin saja. “Saya berharap ada porsi yang adil bagi perusahaan yang sudah legal, apalagi saya orang pribumi asal daerah. Harus dipikirkan untuk kearifan lokal,” pintanya.

Kepala UPP Kelas 111 Batang, Aji Sugiyanto, seusai audiensi menyampaikan bahwa menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh pihak agar seluruh kegiatan di pelabuhan dapat berjalan sesuai aturan yang ada. “Hasil audiensi pada prinsipnya kami ingin sekali merangkul semua. Untuk perizinan PMKU yang sudah mati, akan kami dorong agar segera diurus,” ungkap Aji Sugiyanto.

Aji menambahkan terkait pengisian air tawar untuk kapal nelayan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban, penerbitan tersebut akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama syahbandar perikanan serta Plairud Batang.



Aji Sugiyanto Kepala UUP Kelas III Batang. (Dikin)

“Kita akan berkoordinasi dengan Syahbandar Perikanan serta Polairud Batang akan segera melakukan penertiban,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT GBS, Didik Pramono, menyebut bahwa selama ini kegiatan pengisian air diduga dimonopoli oleh satu pihak yang status legalitasnya tidak jelas. “Kami tidak menuntut penguasaan penuh. Kami hanya ingin pembiasaan win-win, tinggal bagaimana pelaksanaannya,” tambahnya.

Didik menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Menurutnya, UPP Kelas III Batang memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk perusahaan yang memiliki legalitas untuk beroperasi di pelabuhan. “Harus ada kebijakan dari pimpinan syahbandar agar perusahaan legal diberi ruang. Jika tidak ada penyelesaian, kami tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Batang segera turun tangan. Pasalnya, pengambilan air tanah secara terus-menerus berpotensi menyebabkan penurunan permukaan tanah. Sebagai dasar hukum, pemanfaatan air diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Dikin)

Proyek Pengamanan Pantai Bojongsalawe Tahap IV Rampung



Proyek pengaman Pantai Bojongsalawe Tahap IV. (asep sujana)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai 1, Dadan Rahmadani, menyatakan bahwa pembangunan ini krusial untuk melindungi pesisir dari abrasi sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. BBWS Citanduy memberikan apresiasi atas kinerja PT NUAR yang dinilai profesional, memenuhi spesifikasi teknis, dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

“Pekerjaan telah kami selesaikan tepat waktu dan sesuai standar mutu yang ditetapkan,” ujar Doni, pelaksana lapangan PT NUAR.

Rampungnya infrastruktur ini disambut positif oleh warga setempat. Dengan pesisir yang lebih aman dan tertata, Pantai Bojongsalawe kini siap menyambut wisatawan dengan kenyamanan ekstra, yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. (Asep Sujana)

GNPK-RI Pekalongan Raya Soroti Peredaran Miras di Desa Sidayu Bandar



Ketua GNPK-RI Pekalongan Raya, Zaenuri. (Dikin)

warga.

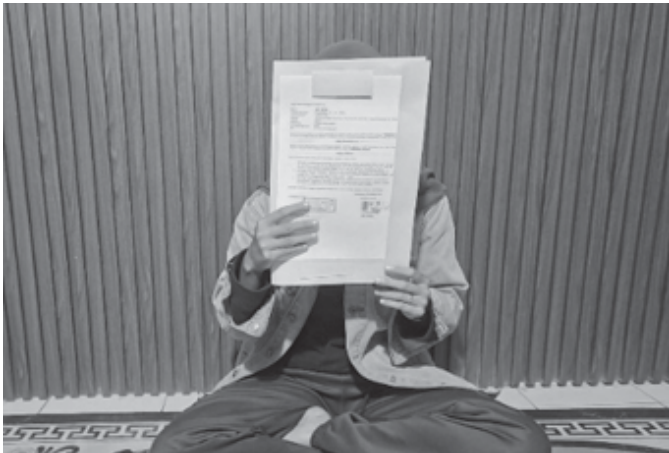
Laporan masyarakat itu diperkuat dengan pemberitaan sejumlah media yang mengangkat keresahan warga Desa Sidayu dan mendesak aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) agar segera melakukan penindakan tegas.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada Kamis 15 Januari 2026 sekitar pukul 10.00 WIB, GNPK-RI Pekalongan Raya mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang guna mengonfirmasi sejauh mana tindak lanjut aparat terhadap pemberitaan yang telah beredar luas. Namun, saat kunjungan berlangsung, Kepala Satpol PP Kabupaten Batang diketahui sedang menjalankan tugas dinas di luar kota.

Ketua GNPK-RI Pekalongan Raya, Zaenuri, menyampaikan keprihatinannya atas lambannya respons aparat, terlebih persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik dan terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Dalam keterangannya, Zaenuri juga menegaskan bahwa dasar hukum penertiban miras saat ini sudah sangat jelas, baik secara nasional maupun daerah.

“Dalam KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang saat ini sudah disosialisasikan secara nasional dan akan efektif berlaku penuh, telah diatur bahwa setiap orang yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin, atau yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keresahan masyarakat, dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maupun pidana kurungan,” ujar Zaenuri. (Dikin)

Jual Motor Berujung Apes, Belum Lunas Motor Amblas



KOTA PEKALONGAN, BN – Seorang perempuan warga Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan berinisial AN (25) mengaku menjadi korban dugaan penipuan dalam transaksi penjualan sepeda motor Honda Vario 125 yang terjadi sejak Juli 2025.

AN, warga Kelurahan Krapyak, menjelaskan bahwa dirinya menjual sepeda motor tersebut melalui seorang makelar berinisial TR, warga Kebulen. Kese-

pakatan awal, motor dijual seharga Rp14,5 juta dengan sistem pembayaran dua tahap “Pembayaran pertama Rp8,5 juta, lalu yang kedua Rp2,5 juta. Sisa uang Rp3,5 juta sampai sekarang belum saya terima,” ujar AN dengan nada sedih, Minggu (18/01/26).

AN menyebut, pembayaran pertama dilakukan pada Juli 2025, sedangkan pembayaran kedua pada Agustus 2025. Namun hingga kini, sisa pembayaran belum diberikan oleh TR. Saat terus menagih, TR beralasan bahwa uang belum tersedia karena pembeli belum melunasi pembayaran.

Namun, AN kemudian mengetahui bahwa BPKB motor sudah diserahkan kepada pihak lain yang tidak ia kenal. “Setiap saya telepon tidak pernah diangkat. Katanya nanti mau ditagihkan ke oknum APH yang diduga bertugas di pekalongan utara” kata AN.

AN juga mengaku sempat menemui seorang oknum aparat penegak hukum (APH) yang disebut-sebut oleh makelar tersebut. Namun, oknum itu menyatakan tidak bertanggung jawab. “Dia bilang hanya menengahi saja para makelar,” ungkap AN.

Merasa dirugikan, AN berharap sisa uang penjualan motornya dapat segera dikembalikan. Ia mengaku sangat membutuhkan uang tersebut karena kondisi ekonomi yang terbatas. “Saya orang kecil. Setiap saya temui makelar, selalu bawa-bawa nama oknum APH yang akan bertanggung jawab,” ujamya sambil menangis.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak makelar TR maupun pihak terkait lainnya. (Dikin)

Pembangunan Tugu Batas Wilayah Kec Ujungjaya Sesuai Harapan Masyarakat

SUMEDANG, BN - Pembangunan Tugu untuk batas wilayah Kecamatan Ujungjaya dikerjakan oleh CV. Rahayu Kinansih. Pekerjaan dilaksanakan selama 35 Hari kalender terhitung mulai tanggal 20 November sampai dengan tanggal 25 Desember 2025.

SAAT dikonfirmasi pelaksana pekerjaan menjelaskan bahwa pekerjaan CV. Rahayu Kinansih Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah mengecewakan hasilnya. Insya Allah memuaskan. “Ini pekerjaan kami sajikan sesuai batas waktu yang tercantum di Papan Informasi mudah mudahan selesai dengan baik,” paparnya.

Direktur perusahaan saat ditemui di rumah kediamannya mengatakan bahwa pekerjaan kami berdasarkan surat kontrak kerja No.04/SPK/PPK/PEM - TUGU UJUNGJAYA/DPUTR/2025 Tanggal 20 November 2025. Pekerjaan Tugu batas Wilayah ini menghabiskan anggaran sebesar Rp.109.900.000,- (Seratus sembilan Juta sembilan ratus ribu rupiah).

CV.Rahayu Kinansih ber alamat Kantor di Dsn. Pangjeleran RT.002 RW.001 Ds. Padasuka Kec. Sumedang Utara Kab Sumedang.

Ditambahkan Rana saat dikonfirmasi mengatakan pula bahwa kami mengucapkan Syukur Alhamdulillah pekerjaan bisa dikerjakan tepat waktu tidak ada yang melewati batas waktu yang telah ditentukan kami masih bisa mempertahankan nama baik Perusahaan walaupun cuaca dan kondisi lapangan yang terlihat menghawatirkan disaat saat ini paparnya. (Ernawan)



Proyek Tugu untuk batas wilayah Kecamatan Ujungjaya yang dikerjakan oleh CV. Rahayu Kinansih. (Ernawan).



Warya Supriatna, S.Pd, Menangkan Pilkades Kamal PAW Periode 2025 - 2029

SUMEDANG, BN - Tepat pada tanggal 10 Desember hari Rabu di Ruangan Bale Desa Kamal, telah diadakan Pemilihan Kades PAW di Desa Kamal Kec. Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. Pemungutan suara dimulai Jam 9.00 WIB dan ditutup kurang lebih

jam 10.00 pagi.

Adapun Panitia mengumumkan hasil perolehan suara akhir diperoleh untuk Kandidat no.1 memperoleh 40 suara dan untuk kandidat no.2. memperoleh 50 suara karena semuanya hanya ada 90 suara yang mewakili masyarakat Desa

Kamal yang diperlukan saat itu.

Adapun nama kandidat tersebut adalah no.1. Amrulah dan kandidat no.2. adalah Warya Supriatna, S.Pd, jadi kemenangan hasil suara dimenangkan oleh no. urut 2 Warya Supriatna, S.Pd. Harapan Ketua BPD disam-

paikan bahwa semoga kepemimpinan yang baru semoga lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Warya Supriatna adalah sosok kepemimpinan sebelumnya memimpin sebagai Kepala Sekolah di beberapa Sekolah di Wilayah Kec Tanjungmedar Kab Sume-

dang. Wajar sekarang memimpin di masyarakat Desa Kamal karena sudah mempunyai bekal kepemimpinan sudah tidak bakalan salah memimpin, tandas beberapa orang sumber di halaman Desa pada saat Pilkades PAW tanggal 10 Desember 2025. (Ernawan)

Sertijab di Lingkungan Sekretariat Dinas Pendidikan Kec. Wado Berjalan Lancar

SUMEDANG, BN - Serah terima Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan Wado dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 7 Januari 2026 dilakukan di Ruang Aula PGRI Kec. Wado. Kegiatan dihadiri

oleh Kabis SD Dayat Hidayatulloh, S.Pd, Pengawas Bina, Nunung, S.Pd. MM. Pd, K3S dan Ketua PGRI Kec. Wado.

Ketujuh Kepala Sekolah tersebut adalah ; Ajat, S. Pd asal dari SD Cipamanyoan

pindah ke SDN Buahngariung, Ade Slamet, S. Pd dari SDN Sukamanah, Eka Irawati, S. Pd dari SDN Buahngariung ke SDN Cikareo I, Nana Suwarna, S. Pd dari SDN Pasirmasigit ke SDN Galemo, Uka Sukaesih, S. Pd

dari SDN Cikawung ke Batulawang, Dayat, S. Pd dari SDN Cilengkrang ke SDN Cimirun, Nana Suherman, S. Pd dari SDN Cislak ke SDN Cilengkrang.

Dayat Hidayatulloh selaku Kabis SD dalam sam-

butannya menyampaikan, “Semoga bapak bapak dan Ibu Ibu Kepala Sekolah di tempat yang baru bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi, lancar tidak ada masalah bisa membawa para tenaga pengajar yang



berkualitas semoga Sumedang mendapat rengking

Pendidik yang lebih baik,” pungkasnya. (Ernawan)



Rehabilitasi Toilet/Jamban SMPN I Tanjungmedar Tepat Waktu

SUMEDANG, BN - Pekerjaan Rehabilitasi Toilet/Jamban Sekolah Menengah Pertama Negeri I Tanjungmedar dikerjakan oleh CV. AZKA & CO. Pekerjaan ini dikerjakan selama 45 hari kalender terhitung mulai Tanggal 17

November 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.

Saat dikonfirmasi pelaksana lapangan mengatakan bahwa betul pekerjaan ini dikerjakan oleh CV. AZKA & CO, “Kami mengerjakan pekerjaan ini

berdasarkan Surat Kontrak Kerja No.04/SPK/PPK/Rehab Toilet - SMPN I Tanjungmedar/Disdik/2025 Tanggal 17 November 2025.”

Dikatakan Pelaksana di lapangan mengatakan, “kami atas nama pekerja di

lapangan mengharapkan pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu walaupun keadaan cuaca seperti ini. Insya Allah bisa dikerjakan dengan baik dan mudah mudahan tidak ada masalah,” tuturnya.

Ditambahkan pula

pelaksana menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pendidikan atas kepercayaan kepada Perusahaan kami yang saat ini sedang kami kerjakan, paparnya. (Ernawan)

Serah Terima Jabatan Pengawas Bina, Kepala Sekolah SDN di Kec Cisit, Sukses

SUMEDANG, BN - Serah Terima Jabatan Pengawas Bina, Kepala Sekolah SDN di Lingkungan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 di Ruang Aula Gedung PGRI Kec Cisit Kab Sumedang.

Serah terima jabatan diantaranya tiga orang pengawas dan empat orang Kepala Sekolah yaitu Fian Sopiansyah, SPd dari Pengawas Kec. Cibugel ke Pengawas Kec. Cisit, Arie Supriatna, S.Pd, dari Pengawas Kec. Sumedang Selatan sekarang ke Cisit, namun masih merang-

kap di Sumedang selatan, Wawat Ernawati, SPd dari Pengawas Cisit alih tugas ke Kec. Cibugel, Rohayati, SPd asal dari Kepala SDN Kawungluwuk II pindah ke SDN Nangerang, Ikoh Rohaeti, SPd asal dari Kepala SDN Nangerang pindah ke SDN Corenda, Dedeh Kur-

niasih, SPd asal dari Kepala SDN Bantarjambi pindah ke SDN Jatiputri, Ratna Nurhaeti, SPd asal dari Kepala SDN Salamjajar pindah ke SDN Sukajaya.

Pada saat acara serah terima jabatan hadir Ketua PGRI Kec. Cisit, K3S Kec. Cisit, Para Kepala Sekolah

se Kec Cisit dan undangan lainnya. Pada saat sambutan Ketua PGRI Kec. Cisit mengatakan bahwa semoga mereka yang ber alih tugas dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik.

“Sesuai janji kita di awal kita dilantik menjadi ASN mengatakan sanggup ditem-



Moment Serah Terima Jabatan Pengawas Bina, Kepala Sekolah SDN di Kec Cisit.

patkan dimana saja itulah perlu kita ingat dan ditempatkan oleh atasan kita itu merupakan penyegaran ba-

gi kita ditempatkan yang baru agar lebih semangat dalam menjalankan tugas,” tandasnya. (Ernawan)

Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirhuni - Jinkang Terkendala Sulitnya Material

SUMEDANG, BN - Pekerjaan Rehab jalan yang menghubungkan Daerah Pasirhuni ke Desa Jinkang dikerjakan oleh CV. Nerra Ningsih berdasarkan Surat Kontrak Kerja No.58/01.0044/SPK/PPK - BM/DPUTR/XI/ 2025 Tanggal 24 November 2025.

Pekerjaan ini menurut Pelaksana di lapangan mengatakan bahwa pekerjaan ini dianggarkan sebesar Rp.393.200.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dikerjakan selama tiga puluh hari kalender terhitung mulai tanggal 24 November sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.

CV.Nerra Ningsih beralamat kantor di Dsn.Sudapati RT.005/RW.001 Kel.Pajagan Kec.Cisit Kabupaten Sumedang. Saat ditemui, pelaksana di lapangan yang di hadapan Dir.Perusahaan mengatakan bahwa saat ini material sedang sulit mencari pasalnya di lapangan pengusaha banyak yang mengalami Kesulitan sehingga datang juga terlambat kemungkinan besar pekerjaan akan terhambat mudah mudahan saja kami akan bekerja sekuat tenaga agar pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu imbuhnya.

(Ernawan)



Proyek Rehabilitasi Ruas Jalan Pasirhuni - Jinkang. (ernawan)

Gubernur Khofifah Resmikan Rehabilitasi dan Revitalisasi 22 Sekolah

❑ Kadindik Aries Agung Paewai Sebut Nilainya Rp 23,71 Milliar

PASURUAN, BN – Sebanyak 22 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah Pasuruan dan Probolinggo menerima program rehabilitasi dan revitalisasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

ADAPUN total anggaran yang dikucurkan dalam program tersebut mencapai Rp 23,71 miliar. Rinciannya, rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas penunjang di wilayah Pasuruan menyasar 16 sekolah dengan anggaran mencapai Rp 16,33 Miliar.

Sementara untuk rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan fasilitas penunjang di wilayah Probolinggo dengan 7 sekolah menggunakan anggaran senilai Rp 7,38 Miliar.

Program rehabilitasi dan revitalisasi sendiri merupakan upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara baik dari sarana prasarana hingga fasilitas sekolah.

Hasil program revitalisasi dan rehabilitasi ini diresmikan langsung oleh Gu-

bernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kadindik Jatim Aries Agung Paewai bertempat di SMAN 1 Taruna Madani Pasuruan, Minggu (18/1) lalu.

Gubernur Khofifah menegaskan, pelaksanaan program tersebut merupakan komitmen Pemprov Jatim terhadap prinsip keadilan dan kemitraan. Sekolah swasta, termasuk SMA, SMK, dan SLB swasta, adalah mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerataan mutu pendidikan agar peserta didik di daerah memiliki akses lingkungan belajar yang layak dan berkualitas, setara dengan sekolah-sekolah di



Khofifah menandatangani prasasti peresmian pembangunan tersebut. (ist)

wilayah perkotaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai menegaskan bahwa pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan di Pasuruan dan Probolinggo bukan sekadar proyek fisik, melainkan ikhtiar menghadirkan keadilan pendid-

dikan bagi seluruh anak di Jawa Timur.

“Pemerataan mutu pendidikan menjadi komitmen utama kami. Anak-anak di wilayah Tapal Kuda harus mendapatkan kualitas layanan pendidikan yang sama baiknya, dengan sarana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung

proses pembelajaran,” kata Aries Agung Paewai.

Menurutnya, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sekolah tidak hanya dipandang sebagai bangunan, tetapi sebagai ruang tumbuh bagi karakter,

nilai, dan potensi peserta didik.

“Ketika ruang kelas menjadi lebih layak, sanitasi memadai, dan fasilitas pendukung tersedia, maka proses belajar mengajar akan berjalan lebih optimal. Ini akan berdampak langsung pada semangat belajar siswa dan kinerja guru,” tambahnya.

Rehabilitasi dan revitalisasi yang dilakukan mencakup 16 sekolah di wilayah Pasuruan.

Dikemukakan pula, keterlibatan sekolah swasta dan SLB dalam program ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan dilakukan secara inklusif dan berkeadilan. “Sekolah negeri maupun swasta adalah satu ekosistem. Semua memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, peningkatan sarana prasarana harus dipandang sebagai investasi bersama untuk masa depan pendidikan Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perbaikan fisik sekolah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan fasilitas secara optimal, penguatan kepemimpinan kepala sekolah, serta inovasi guru dalam proses belajar menjadi kunci agar pemerataan mutu benar-benar dirasakan oleh siswa.

“Tantangan ke depan bukan hanya membangun gedung yang kokoh, tetapi memastikan sekolah-sekolah ini mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap wilayah Pasuruan dan Probolinggo semakin memiliki sekolah-sekolah yang representatif, ramah anak, dan inklusif, sehingga pemerataan mutu pendidikan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hadir di ruang-ruang kelas hingga pelosok Tapal Kuda. (dji)

Pemkab Asahan Terima Kunjungan Kerja DPRD Sumatera Utara, Bahas Ranperda Pesantren

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, para

Asisten Setdakab Asahan, para Kepala OPD dan Kepala Bagian, serta jajaran DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah dan provinsi.

Pada kesempatan tersebut, kunjungan kerja diterima oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, yang menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada rombongan Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pe-

merintah Kabupaten Asahan memandang pertemuan ini sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya terhadap visi daerah “Kabupaten Asahan

Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan” serta dukungan terhadap visi Presiden Republik Indonesia “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Unsur religius dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, yang salah satunya diwujudkan melalui penguatan peran pondok pesantren. Saat ini, pondok pesantren di Kabupaten Asahan tersebar di 15 kecamatan dengan jumlah

23 pondok pesantren dan total santri mencapai 8.139 orang.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan bahwa pembentukan Ranperda Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan dukungan negara terhadap pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Perda ini



Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan saat menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. (tp)

diharapkan dapat memperkuat tata kelola pesantren, membangun kemitraan yang sehat, serta mencegah potensi konflik internal, dengan tetap menghormati otonomi, kemandirian, kekhlasan, dan tradisi pondok

pesantren. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat dari Pemerintah Kabupaten Asahan kepada Tim Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk penghargaan dan penguatan sinergi. (TP)

Klarifikasi Dinas Pertanian Subang Tak Menjawab Persoalan Bantuan Combine



SUBANG, BN- Klarifikasi yang disampaikan Dinas Pertanian Kabupaten Subang terkait dugaan penyimpanan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan)

jenis combine harvester Maxxi Bimo 102 bantuan tahun 2023 dinilai belum menjawab pokok persoalan yang dipertanyakan publik.

Hal tersebut menyusul adanya dugaan penerimaan uang sebesar Rp70 juta oleh oknum Dinas Pertanian, yang hingga kini belum dibantah maupun diakui secara tegas oleh pihak terkait.

Klarifikasi disampaikan

oleh Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Sukma, sebagai jawaban atas surat konfirmasi wartawan Bidik Nasional tertanggal 14 Januari 2026.

Namun dalam jawabannya, Sukma hanya menyebutkan bahwa pihaknya telah meminta Inspektorat Kabupaten Subang melakukan pemeriksaan serta menyampaikan bahwa permasalahan tersebut disebut telah diklarifikasi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, tanpa memberikan penjelasan spesifik terkait dugaan penerimaan uang Rp 70 juta.

Sikap tersebut dinilai tidak menjawab substansi pertanyaan media, sehingga memunculkan persepsi publik bahwa persoalan inti justru dihindari.

Kronologis Dugaan Penyimpangan Bantuan Com-

bine 2023, berdasarkan hasil penelusuran dan konfirmasi awak media Bidik Nasional, bantuan alsintan jenis combine harvester Maxxi Bimo 102 dialokasikan untuk Kelompok Tani Saradan, Desa Kalen Tambo, Kec Pusak nagara, Kab Subang.

Ketua Kelompok Tani Saradan, Jaka, menyatakan kepada awak media bahwa dirinya tidak pernah menerima maupun menguasai bantuan combine tersebut. Ia mengakui hanya diminta hadir dan menandatangani dokumen administrasi penerimaan tanpa mengetahui proses pengusulan, pengelolaan, maupun operasional alat di lapangan.

Lanjutnya Jaka, Bantuan combine tersebut diduga tidak dikelola oleh kelompok tani penerima, sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan keberadaannya di

lapangan tidak diketahui secara jelas oleh pengurus kelompok, ucapnya.

Tempat terpisah awak media Bidik Nasional kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada H. Jamali, yang mengakui adanya penyerahan uang sebagaimana dimaksud sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta) kepada Sukma selaku kasi Dinas pertanian Subang.

Perlu diluruskan, H. Jamali bukan anggota Kelompok Tani Saradan, melainkan merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalen Tambo dengan jabatan sebagai Wakil Ketua BPD. Awak media juga mengantongi bukti rekaman yang dinilai relevan dengan pengakuan adanya penyerahan uang tersebut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, awak media mengirim surat konfirmasi

resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Subang untuk meminta penjelasan terkait dugaan penerimaan uang Rp70 juta.

Dalam jawabannya, pihak Dinas Pertanian tidak memberikan bantahan atau pengakuan secara tegas, melainkan menyebutkan telah meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan dan menyatakan persoalan tersebut telah diklarifikasi oleh Kejari Subang.

Klarifikasi tersebut dinilai belum menyentuh substansi utama, yakni ada atau tidaknya penerimaan uang Rp70 juta oleh oknum Dinas Pertanian.

Menanggapi hal ini, Advokat Muda Prabu Lawyer menegaskan bahwa penyaluran bantuan alsintan telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor

10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa, bantuan alsintan wajib dikelola oleh kelompok tani penerima dan Dilarang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak di luar kelompok tani, dan dilarang adanya setoran, pungutan, atau imbalan dalam bentuk apa pun dalam proses penyaluran bantuan.

Lanjutnya Prabu Lawyer menyampaikan, apabila terbukti adanya penerimaan uang oleh pejabat atau penyelenggara negara, maka perbuatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (tohir)

Oknum Guru SMAN I Aek Kuo Diduga Lakukan Bullying Terhadap Murid

LABURA, BN - Aek Korsik, kecamatan Aek Kuo, Labuhanbatu Utara, 19 Januari 2026. Nissa Dalimunthe selaku ketua solidaritas perempuan merdeka Labuhanbatu Raya, mengaku miris setelah mendengar bullying guru terhadap murid di SMA Negeri 1 Aek Kuo, Labuhanbatu Utara.

Menurut Nissa, hal tersebut disampaikan oleh beberapa siswa SMA Negeri 1 bahwa mereka sering mendapatkan perilaku buruk dari beberapa oknum guru. “Beberapa murid menyatakan kepada saya, bahwa mereka sering dimaki dengan kata-kata kasar, kadang dikatakan miskin gak tahu diri oleh beberapa oknum guru di sekolahnya. Hal tersebut tidak mencerminkan sebagai pendidik yang baik untuk generasi muda,” ujar Nissa Dalimunthe.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH

Telah hilang Sertipikat Hak Milik Nomor : 00332 SPPT: 32.18.061.004.003-0227.0, Luas Tanah 317 M2, Terletak di Kp Katimaha RT 003/RW 006, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, atas nama NURHAYATI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat rumah Kp Katimaha RT 002/RW 006, Desa Karanganyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Bagi yang menemukan mohon menghubungi Ibu Nurhayati.

Bupati Asahan Uji Terbang Drone Pertanian di Lahan Pangan Padi Gogo Kodim 0208/AS



Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. saat uji terbang drone pertanian di lahan pangan tanam padi gogo Kodim 0208/Asahan. (TP)

ASAHAN, BN - Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. Melakukan uji terbang drone pertanian di lahan pangan tanam padi gogo Kodim 0208/Asahan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan terhadap pemanfaatan teknologi modern di sektor

pertanian, Rabu (31/12/2025). Tanpa hadir Dandim 0208/AS, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Perwakilan PT Kurin Muria Gemilang, TNI, Kelompok Tani serta hadirin lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan modernisasi pertanian

sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Drone pertanian tersebut dimanfaatkan untuk membantu pemantauan lahan, penyemprotan pupuk, serta pengendalian hama secara lebih efektif dan efisien. Bupati Asahan dalam keterangannya menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi pertanian menjadi kebutuhan penting dalam menjawab tantangan pertanian saat ini, terutama keterbatasan tenaga kerja dan luasnya lahan pertanian. “Pemanfaatan drone pertanian ini merupakan langkah maju dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Asahan. Dengan teknologi ini, pekerjaan petani menjadi lebih efisien, hemat waktu, dan hasilnya diharapkan semakin optimal,” ujar Bupati

Asahan. Lebih lanjut Bupati Asahan menegaskan bahwa pengembangan padi gogo memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah, khususnya pada lahan kering yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. “Padi gogo menjadi salah satu alternatif penguatan ketahanan pangan. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi pertanian agar petani semakin sejahtera,” tegasnya. Melalui uji terbang drone pertanian ini, Bupati Asahan berharap ke depan teknologi pertanian modern dapat semakin luas diterapkan oleh para petani, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Asahan semakin maju, mandiri, dan berdaya saing. (TP)

Pemkab Lantik Anggota KPAD Kabupaten Asahan Periode 2026–2030

ASAHAN, BN - Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan masa jabatan 2026–2030 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan perlindungan anak di daerah dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait.

Pelantikan Anggota KPAD Kabupaten Asahan periode 2026–2030 tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Asahan Rianto, yang secara resmi mengambil sumpah jabatan para anggota KPAD. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, integritas, serta sinergi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Asahan. Ketua KPAD Kabupaten Asahan terpilih masa jabatan



Pelantikan Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan. (TP)

2026–2030, Awaluddin, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa KPAD akan menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan fokus pada pencegahan, edukasi, serta penanganan kasus anak secara komprehensif. Ia menegaskan komitmen KPAD untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Pelantikan ini menjadi awal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota KPAD Kabupaten Asahan periode 2026–2030 dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak. Adapun susunan Anggota KPAD Kabupaten Asahan masa jabatan 2026–2030 terdiri atas Eva Lusiana Munthe, S.KM.; Awaluddin, S.Ag., M.H.; Sabar Mulia Panjaitan, S.H.; Mohd. Siddiq; dan Nina Waslina, S.E., yang diharapkan mampu menjalankan amanah secara optimal demi terwujudnya Kabupaten Asahan yang peduli dan ramah anak. (TP)

Wabup Asahan Hadiri Tasyakuran HAB ke-80 Kemenag



ASAHAN, BN - Kementerian Agama Kabupaten Asahan menggelar Tasyakuran Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026 dengan mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Rabu (07/01/2026). Acara tasyakuran ini dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan, mewakili Kejaksaan Negeri Asahan, mewakili Kapolres Asahan, mewakili Dandim 0208/Asahan, mewakili Danlanal TBA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan beserta jajaran, serta tamu undangan lainnya. Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Asahan, Hj Sri Muchlis SSos MIKom menyampaikan bahwa peringatan HAB ke-

80 merupakan momentum rasa syukur kepada Allah SWT atas perjalanan panjang Kementerian Agama yang telah berdiri selama 80 tahun sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa peran Kementerian Agama saat ini semakin luas dan krusial, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, tetapi juga dalam merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi atas berbagai persoalan bangsa. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan, H Abdul Manan MA dalam sambutannya menyampaikan bahwa HAB ke-80 merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur karena seluruh jajaran Kementerian Agama masih dapat terus mengabdikan

kepada bangsa dan negara. Ia berharap, di usia ke-80 ini, Kementerian Agama Kabupaten Asahan dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat serta membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan keagamaan. Selain itu, ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 Kemenag Kabupaten Asahan harus mampu mensinergikan seluruh program kerjanya dengan Pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi yang telah dicapai Kementerian Agama hingga usia 80 tahun patut disyukuri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umat dan bangsa. Ia berharap peringatan HAB tidak hanya bernilai seremonial, tetapi mengandung makna untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan di berbagai bidang, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian bersama. Oleh

karena itu, peringatan Hari Amal Bakti harus dijadikan sebagai momentum perenungan dan evaluasi atas seluruh amal bhakti kepada umat, negara, dan bangsa, sekaligus membangun sinergi dan harmoni untuk melaksanakan hal-hal yang lebih bermakna. (TP)

PAGARALAM, BN - Satres Narkoba Polres Kota Pagar Alam menunjukkan kinerjanya. Selasa (13/01/2026) sekira pukul 00.30 wib berhasil menangkap dua pengedar sabu di pasar Nendagung Jl. Letnan Muda Nur Majais Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.

Kasat Res Narkoba Polres Pagar Alam Iptu Doris Pidriandi, S.H.,M.Si menyampaikan, berawal dari laporan masyarakat di daerah pasar terminal nendagung sering dijadikan tempat transaksi narkoba, Kemudian dilakukan penyelidikan oleh Anggota Satres Narkoba didaerah tersebut didapati satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan saat dihipir oleh petugas Satres Narkoba satu orang laki-laki dan satu orang perempuan melarikan diri. Polisi lalu melakukan pengejaran terhadap orang yang melarikan diri tersebut dan berhasil mengamankan dua orang Perempuan yang mengaku bernama berinisial Anggun (23) pekerjaan ibu rumah tangga dan Tiwi (29). Sedangkan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya berhasil melarikan diri, setelah dua orang

Bupati Asahan Lepas Bantuan Korban Bencana di Sumut, Aceh dan Sumbar



Bupati Asahan saat melepas bantuan untuk korban bencana alam. (ist)

ASAHAN, BN - Bupati Asahan bersama Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Tanjung Balai Asahan serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan secara resmi melepas bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera

Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa (30/12/2025). Pelepasan bantuan ini turut dihadiri dan didampingi oleh para Asisten Pemerintah Kabupaten Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan, Kepala Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, para Kepala Bagian Setdakab Asahan, Camat se-Kabupaten Asahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Imtaq, Forkala, tokoh-tokoh agama tokoh tokoh etnis serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Bantuan yang disalurkan merupakan hasil donasi dari Pemerintah Kabupaten Asahan bersama masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana. Adapun bantuan yang dilepas meliputi berbagai kebutuhan pokok, antara lain beras sebanyak 12.010 kg, mi instan 478 kotak, pop mie 124 kotak, air mineral 195 kotak, roti 27 kotak, minyak goreng 147 liter, pakaian layak pakai 357 karung, kebutuhan bayi (pampers) 13 kotak, gula putih 15 kg, susu 13 kotak, sarden 4 kotak, kacang hijau 10 kg, serta kebutuhan medis berupa obat-obatan dan tikar. Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban bencana serta menjadi wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Asahan bersama seluruh elemen masyarakat. “Semoga bantuan ini dapat sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dan memberikan manfaat bagi mereka yang sedang tertimpa musibah. Ini adalah bentuk kebersamaan kita dalam menghadapi bencana,” ujar Bupati Asahan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asahan juga menyampaikan doa dan harapan agar ke depan, khususnya memasuki tahun 2026, Kabupaten Asahan menjadi daerah yang lebih baik lagi, aman, damai, dan sejahtera serta pembangunan dapat berjalan dengan lancar dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. (TP)

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkot Pagar Alam Kembangkan Budidaya Bawang Merah



Budidaya bawang merah oleh Pemkot Pagar Alam. (ist)

PAGARALAM, BN - Pemerintah Kota Pagar Alam terus berupaya menekan laju inflasi dan memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui pengembangan budi daya bawang merah. Upaya tersebut ditandai dengan panen raya bawang merah varietas Bima di Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah, Rabu 14 Januari 2026.

Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah didampingi Sekretaris Daerah Zaily Oktosab Fitri Abidin mengatakan, budi daya bawang merah merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. Ia mengapresiasi para petani Pelang Kenidai atas keberhasilan panen yang dinilai membuktikan sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Menurut Wali Kota, varietas Bima memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Pagar Alam. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung sektor pertanian melalui peningkatan sarana prasarana, pendampingan teknis, serta penguatan kelompok tani guna mewujudkan swasembada pangan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menerima rompi Satgas Swasembada Pangan dari Kementerian Pertanian RI sebagai simbol tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, Ketua Komunitas Petani Bawang Merah Kota Pagar Alam, Supri, menyampaikan harapan agar petani mendapatkan bimbingan teknis dari dinas terkait untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang budi daya Bawang Merah. Menurutnya, produksi bawang merah di Pagar Alam saat ini masih relatif terbatas dan masih didominasi pasokan dari luar daerah. Meski demikian, dari sisi kualitas, bawang merah Pagar Alam dinilai tidak kalah bersaing. “Kami sangat berharap adanya pendampingan dan bimbingan teknis, khususnya dalam budidaya bawang merah, agar produksi lokal dapat terus meningkat,” ujar Supri. (leo)

Satres Narkoba Polres Pagar Alam Ringkus Dua Cewek Pengedar Sabu



Dua tersangka pengedar Sabu yang ditangkap Satres Narkoba Polres Pagar Alam. (ist)

perempuan diamankan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan satu kotak rokok Saporna evolution berwarna merah yang didalamnya berisikan satu bungkus plastik klip merah yang berisikan narkotika jenis Sabu.

Atas kejadian tersebut, dua orang perempuan berinisial Anggun dan Tiwi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Pagar Alam guna pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku dikenakan pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika Jo UU No 1 Tahun 2026 ttg penyesuaianbpi dan atau pasal 609 (1) hurup a UU No. 1 Tahun 2023 ttg Kuhp Jo UU No 1 Tahun 2026 ttg penyesuaian Pidana Jo pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ungkap Iptu Doris Pidriandi, SH, M.Si.

Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada,S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Mansyur. S. H kedua pelaku akan dikenakan pidana yang berat sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. (leo)

MUI Kabupaten Pinrang Gelar Musyawarah Daerah Ke-7

PINRANG, BN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-7 yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang, Sabtu (10/1/2026)

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembinaan umat dan pembangunan sektor keagamaan di Kabupaten Pinrang.

Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran MUI sangat vital dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang membentuk masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.

Menurutnya, ulama memiliki posisi strategis sebagai pembimbing umat, terutama dalam menjaga nilai-nilai keagamaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Olehnya itu, sinergi antara ulama dan pemerintah (umara) menjadi hal yang mutlak dilakukan. “Jika ulama dan pemerintah berjalan seiring, maka umat akan ikut bersatu. Sinergi ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang religius, rukun, dan berkontribusi positif dalam pembangunan daerah,” ungkap Wabup Sudirman.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa MUI merupakan wadah yang tepat dalam menghimpun peran ulama untuk bersama-sama membina umat, khususnya di Kab Pinrang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.



Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si, saat memberi sambutan. (ist)

Keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui Musda ini diharapkan mampu membawa MUI Pinrang semakin optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengayoman umat.

Dalam Musda ke-7 ini, KH. Masse Laibu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI Kabupaten Pinrang, setelah sebelumnya menjabat selaku Pelaksana tugas Ketua MUI Pinrang, mengisi kekosongan jabatan setelah ditinggalkan oleh KH. Abd. Salam Latarebbi yang wafat beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua MUI Pinrang terpilih KH. Masse Laibu dalam penyampaianya mengungkapkan komitmennya untuk terus memperkuat peran MUI sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dan pembina umat melalui program kerja yang akan disusun bersama pengurus.

Dirinya berharap, keberadaan MUI ke depan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam membentuk umat yang berakhlak, moderat, dan menjunjung tinggi persatuan.

“Peran MUI adalah memastikan umat terus berada pada jalan kebaikan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan umat,” tutupnya.

Melalui Musda ini, diharapkan sinergi ulama dan pemerintah semakin kokoh demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang religius, damai, dan sejahtera.

(*/sabir)

Hadiri Pisah Sambut Wakapolres Lambar, Wabup Harap Sinergitas Dapat Ditingkatkan

LAMPUNG BARAT, BN- Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin menghadiri acara pisah sambut Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Lampung Barat dari pejabat lama, Kompol Samsuri, S.H., M.H digantikan Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H, Senin 12 Januari 2026.

Untuk diketahui, Samsuri yang sebelumnya menjabat Wakapolres Lampung Barat pindah ke Polres Kabupaten Prengsewu dengan jabatan yang sama. Sementara Abdul Rasyid sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Bandar Lampung.

Dalam sambutannya, Mad Hasnurin mengatakan kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi, menjaga kesinambungan kepemimpinan, serta menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban



Pisah sambut Wakapolres Lambar. (ist)

masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh masyarakat, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kompol Samsuri, S.H., M.H. atas pengabdian, dedikasi, dan kerja keras yang telah diberikan selama bertugas di Lampung Barat.

“Berbagai dinamika dan

tantangan keamanan di wilayah Lampung Barat, baik yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial kemasyarakatan, maupun agenda-agenda strategis daerah, telah dihadapi dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” kata Md Hasnurin.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara Polres Lampung Barat dengan Pemerintah Daerah, Forko-

pimda, serta seluruh elemen masyarakat selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif.

Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Mad Hasnurin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, serta mendoakan agar Samsuri senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam melanjutkan pengabdian di tempat tugas yang baru.

Selanjutnya, Mad Hasnurin menyampaikan selamat datang kepada Wakil Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat yang baru Kompol Abdul Rasyid, S.H., M.H “Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kab Lampung Barat,” ujarnya. (Taufik)

KPU OKI Tunggu KPU RI Terkait PAW

OKI, BN - HI, yang menjabat sebagai Komisiner Divisi Perancangan Data dan Informasi, diduga terlibat tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.728.709.454. Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah).

Vonis ini dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Sangkot Lumban Tobing di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palembang, Jumat (14/11/2025).

Dalam amar putusannya, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Mengadili, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hadi Irawan dan Ihsan Hamidi masing-masing selama 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.”

Terkait keputusan tersebut ketua KPU Kabupaten OKI



Ketua KPU Kabupaten OKI Muhammad Irsan, SE. (ist)

Muhamad Irsan. SE mengatakan permasalahan gaji untuk saudara HI, saat diputus bersalah gaji HI sudah tidak diberikan lagi oleh sekretariat KPU, tegas Irsan.

Kalau untuk PAW butuh proses, kami menunggu arahan dari KPU RI dahulu. Harus dilakukan pemberhentian dahulu, kami juga masih menunggu Surat Keputusan tersebut, KPU OKI hanya menunggu dari KPU RI melalui KPU provinsi Sumatera Selatan, kita berkoordinasi saja, keputusan ada pada KPU RI melalui KPU provinsi.

Irsan mengatakan, KPU OKI juga sedang menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan komisiner KPU OKI, setelah ditinggalkan HI yang kini menjalani hukuman dipegang oleh ketua.

Kita berharap kekosongan komisiner tersebut dapat segera terisi karena mengingat tugas sudah menunggu dari pemuktahiran data pemilih dan tahun 2027 pertengahan kita sudah mulai persiapan untuk pemilihan umum 2029, jelas Irsan. (Nurlis)

menunggu proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan komisiner KPU OKI, setelah ditinggalkan HI yang kini menjalani hukuman dipegang oleh ketua.

Kita berharap kekosongan komisiner tersebut dapat segera terisi karena mengingat tugas sudah menunggu dari pemuktahiran data pemilih dan tahun 2027 pertengahan kita sudah mulai persiapan untuk pemilihan umum 2029, jelas Irsan. (Nurlis)

Wabup Pinrang Sudirman Bungi Hadiri Wisuda Sarjana STKIP DDI Pinrang

PINRANG, BN - Pemerintah kabupaten Pinrang menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pihak dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.IP., M.Si saat memberikan sambutan pada Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) DDI Pinrang, yang digelar di The M Hotel, Kamis (8/1/2026)

Dalam penyampaianya, Wabup Sudirman mengungkapkan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dan kontribusi seluruh elemen,

termasuk lembaga pendidikan tinggi sebagai pencetak generasi penerus bangsa.

Menurutnya, di era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, tantangan yang dihadapi para lulusan muda semakin kompleks. Olehnya itu, dibutuhkan kesiapan mental, kemampuan beradaptasi, serta komitmen yang kuat untuk ikut mengambil peran dalam pembangunan.

Wabup Sudirman mengajak para lulusan STKIP DDI Pinrang untuk tidak takut memulai dari hal-hal kecil. Menurutnya, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menjadi pondasi menuju masa depan yang lebih besar. (*/sabir)

Pemkab Lambar Reformasi Arah Pendidikan, Disiplin, Literasi dan Inovasi Diperketat



Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama staf saat rapat koordinasi Pendidikan Tahun 2026. (taufik)

LAMPUNG BARAT, BN - Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bersama staf jajaran menggelar rapat koordinasi Pendidikan Tahun 2026, Rapat koordinasi yang dihadiri kepala OPD, camat, serta kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab setempat.

Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat menegaskan komitmen memperkuat kualitas pendidikan melalui sinergi lintas sektor. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, saat memimpin Rapat Koordinasi Pendidikan Tahun 2026, di Aula Kagungan Rabu (14/1/2026).

Rapat koordinasi yang dihadiri kepala OPD, camat, serta kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Lampung Barat itu menjadi forum strategis menyatukan langkah meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Bupati Parosil menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan kurikulum, tetapi juga oleh keteladanan para pimpinan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memegang peran sentral dalam membangun budaya disiplin.

“Kepala sekolah harus menjadi contoh. Disiplin itu dimulai dari pimpinan. Kalau kepala sekolah datang pagi dan menyambut siswa, itu memberi pesan kuat tentang kepedulian dan tanggung jawab,” ujar Parosil.

Ia menilai kehadiran kepala sekolah di pagi hari bukan sekadar rutinitas, melainkan simbol pengawasan dan pembentukan karakter peserta didik sejak dini. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim sekolah yang lebih tertib dan humanis.

Selain kedisiplinan, Parosil juga menyoroti pentingnya penguatan budaya literasi. Ia meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merancang program kunjungan sekolah ke perpustakaan daerah sebagai bagian dari pembelajaran di luar kelas.

“Literasi tidak boleh berhenti di ruang kelas. Kita dorong anak-anak datang ke perpustakaan, membaca, dan menjadikan literasi sebagai kebiasaan,” kata Parosil. (Taufik)

2026, Direktur Perumda Air Minum Waemanurung Fokus Perbaikan Pipa Tua

BONE, BN — Direktur Perumda Wae Manurung Bone Muh.Bachtiar Sairing, S.Sos fokus perbaikan pipa PDAM ditahun 2026 yang sudah tua demi meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pelanggan.

Muh. Bachtiar Sairing terus melakukan konsolidasi sesama Pemerintah daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat utamanya air yang tidak mengalir dengan baik di setiap pelanggan.

“Ditempat terpisah Wakil Bupati Bone, Dr Andi Akmal Pasluddin, SP, MM akan terus berkoordinasi dengan Direktur Perumda Air Minum WM untuk terkait instalasi PDAM yang kurang bagus yang mengakibatkan tidak lancarnya air mengalir ke rumah pelanggan,” tutur A.Akmal saat debat Publik di Cafe 24 Jalan Veteran Kelurahan Watampone.

Andi Agus warga Watampone berharap air PDAM berharap airnya lancar mengalir di setiap rumah pelanggan,karena itu adalah keluhan masyarakat,itu disampaikan kepada Wakil Bupati Bone saat dialog publik. (Suspi)



Direktur Perumda Wae Manurung Bone Muh.Bachtiar Sairing, S.Sos.

Pemkab Pinrang Syukuran Swasembada Pangan



PINRANG, BN - Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan membuahkan hasil. Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu negara yang mampu mencapai swasembada pangan.

Capaian ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Panen Raya sekaligus pengumuman swasembada pangan yang digelar secara hybrid, Rabu (7/1/2026)

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa berbagai langkah strategis yang dilakukan hampir satu tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil nyata.

Presiden menegaskan, keberhasilan swasembada pangan ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait, hingga para petani yang disebutnya sebagai pahlawan pangan bangsa.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya. Namun, kesejahteraan tidak akan terwujud jika kebutuhan pangan masih bergantung pada negara lain. Inilah semangat besar yang mendorong kita untuk mencapai swasembada pangan,” ungkap Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, swasembada pangan bukan sekadar capaian sektor pertanian, tetapi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan sektor lainnya yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Presiden pun menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut dan berharap keberhasilan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia, A. Amran Sulaiman, mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan swasembada pangan ini. Sementara Pemkab Pinrang melakukan syukuran atas keberhasilan swasembada pangan ini. (*/Sabir)



Sudirman Bungi, saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) DDI Pinrang. (ist)

Soal Hunian Tak Layak Huni, Ketua Sundawani Nilai Ada Pembiaran Sistemik



Ketua Sundawani Wirabuana Kuningan Kota, Dian Basudiman (Ed)

KUNINGAN, BN – Di balik statistik pembangunan dan deretan capaian administratif Pemerintah Kabupaten Kuningan, masih tersisa persoalan mendasar yang luput dari perhatian: keselamatan warga di rumah-rumah yang tak lagi layak dihuni. Sejumlah bangunan tempat tinggal dilaporkan mengalami kerusakan struktural serius, namun penanganannya berjalan lamban. Ketua Sundawani Wira-

buana Kuningan Kota, Dian Basudiman, menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras atas lemahnya keberpihakan kebijakan pada kebutuhan paling dasar masyarakat. “Ketika rumah sudah tidak aman untuk ditinggali, itu bukan lagi soal bantuan sosial, tapi soal tanggung jawab negara melindungi warganya,” kata Dian, Selasa (20/1/2026). Menurut Dian, kasus rumah warga retak berat di Desa Sangkanhurip, Kecamatan Cigandamekar, menunjukkan adanya celah besar antara laporan lapangan dan respons birokrasi. Rumah milik Titin Sutinah, yang me-

ngalami kerusakan pada sejumlah bagian vital bangunan, hingga kini belum mendapatkan penanganan memadai, meski kondisinya dinilai mengancam keselamatan penghuni. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi. Seorang janda lanjut usia bernama Utin terpaksa bertahan di rumah yang telah lama dinyatakan tidak layak huni bersama anak dan cucunya. “Ini bukan kasus tunggal. Ini potret sistem yang tidak bekerja. Laporan sudah masuk, data sudah ada, tapi responsnya nihil,” ujar Dian. Ia menilai, persoalan rumah tidak layak huni seharusnya menjadi prioritas uta-

ma dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap program. “Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari proyek besar dan seremoni. Ukurannya adalah apakah warga paling rentan merasa aman di rumahnya sendiri,” tegasnya. Sundawani Wirabuana Kuningan Kota mendorong Pemkab Kuningan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan perumahan, serta memastikan adanya langkah darurat bagi warga yang tinggal di hunian berisiko tinggi. “Jika negara baru hadir setelah rumah roboh, itu bukan kehadiran, tapi penyesalan,” pungkas Dian Basudiman. (Ed)

Bupati Bogor Jalin Silaturahmi Dengan Paspampres



Bupati Bogor Rudy Susmanto (nomor 2 dari kanan). (eml)

JAKARTA, BN – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas lembaga, salah satunya bersilaturahmi dengan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Republik Indonesia, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha. Silaturahmi ini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan di Kabupaten Bogor. Silaturahmi berlangsung di Markas Komando (Mako) Paspampres RI, Jakarta, Jum’at pekan lalu. Hadir bersama Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Inf. Henggar Tri Wahono. Silaturahmi tersebut juga menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Paspampres RI beserta jajaran, khususnya dalam mendukung pengamanan kegiatan kenegaraan yang kerap berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan, bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan Dandim 0621 Kabupaten Bogor, kami bersilaturahmi dengan Komandan Paspampres RI, Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha. “Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Paspampres beserta jajaran, guna menjaga keamanan serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor,” jelas Rudy. Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Pemkab Bogor dan Paspampres RI semakin solid, sehingga pelaksanaan tugas pengamanan negara dapat berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Bogor. (eml)

Kapolres Silaturahmi ke Kajari Labuhanbatu



Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si saat mengunjungi Kajari Labuhan Batu. (ist)

LABUHANBATU, BN – Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si didampingi para Pejabat Utama (PJU) Polres Labuhanbatu melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang berlokasi di Jalan S.M. Raja, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, pada Selasa, 20 Januari 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Asnath Anytha Idatua

Hutagalung, S.H., M.H. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk penguatan hubungan kelembagaan antara Polres Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Labuhanbatu bersama Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam menjaga harkamtibmas di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Selain itu, kedua pimpinan sepakat untuk saling berkolaborasi dalam bidang penegakan hukum serta meningkatkan hal-hal positif yang selama ini telah terjalin dengan baik demi memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat. Kunjungan kerja dan silaturahmi ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi lintas institusi, sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si menyampaikan bahwa sinergitas antara Polri dan Kejaksaan merupakan kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Kabupaten Labuhanbatu. (M.Sukma)

Evaluasi Program MBG, Sekda Labuhanbatu Ajak Pengelola Dapur dan SPPG Perkuat Komitmen Pelayanan



Rapat Evaluasi Program MBG. (sukmo)

LABUHANBATU, BN – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terus berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian dan pengawasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ir. Hasan Heri Rambe, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG, menggelar rapat evaluasi bersama para pengelola dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat yang berlangsung di Ruang Data dan Karya, Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu, pada Selasa (20/01) tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai kendala yang ditemui selama pelaksanaan program MBG di lapangan. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, para Asisten Setdakab, Staf Ahli Bupati, kepala OPD terkait, Satgas MBG, Kepala SPPG, serta Ketua Yayasan Pengelola Dapur. Dalam suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, Sekda Hasan Heri Rambe menegaskan bahwa evaluasi ini bukan semata mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai standar dan tetap mengutamakan kesehatan serta keselamatan para penerima manfaat. “Program MBG ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. Karena itu, kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama kita bersama,” ujarnya. Ia menjelaskan, beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, izin kualitas air, hingga izin pengelolaan limbah. Menurutnya, kelengkapan administrasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga mutu layanan. Hasan Heri Rambe juga menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa dapur yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi secara bertahap dan proporsional, sembari tetap dibina agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan. “Kami mendorong percepatan pengurusan sertifikasi, namun tetap harus sesuai prosedur. Tujuan akhirnya satu, agar masyarakat merasa aman dan terlindungi,” tambahnya. Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Labuhanbatu, Prisila Dinanti, menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 12 dapur SPPG yang telah beroperasi dan melayani masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun yayaan pengelola dapur SPPG tersebut antara lain Yayasan Kumle Jaya Bermartabat, Yayasan Al Azhar Padang Lawas, Yayasan Darul Hasanah Bilah, Yayasan Merah Putih Sejati, Yayasan Widia Loka Lestari, Yayasan Tunas Muda Asahan, Yayasan Kemala Bhayangkari, Yayasan Jamsan Peduli Umat, serta Yayasan Kolaborasi Ridefa Kharsa yang tersebar di sejumlah kecamatan. Melalui rapat evaluasi ini, para pengelola yayasan menyatakan komitmennya untuk terus berbenah, mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, serta memberikan pelayanan terbaik bagi para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Labuhanbatu. (M.SUKMA)

DPA Pemkab OKI 2026 Fokus Anggaran Prioritas, Realisasi Digas

OKI, BN – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, Selasa (13/1/2026). Pada 2026, Pemkab OKI mengelola anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Angka tersebut menurun Rp 245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Meski demikian, Bupati Muchendi menegaskan penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambannya pelaksanaan program dan pelayanan publik. “Anggaran kita tahun ini Rp 2,2 triliun, memang turun. Namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan,” kata Muchendi saat memberikan arahan di Ruang Rapat Bende Seguguk, Kantor Bupati OKI, Selasa (13/1). Muchendi menekankan pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program prioritas kepala daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia meminta OPD memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain penajaman prioritas, Muchendi juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas serta percepatan realisasi anggaran. Menurut dia, keterlambatan realisasi akan berimbas pada tertundanya manfaat program dan perputaran ekonomi daerah. “Kita sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendasak dan alihkan ke program produktif. Realisasi anggaran harus digas karena memberi multi player effec kepada masyarakat,” ujarnya. Muchendi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menuntaskan permasalahan pembangunan. “Tahun 2025 sudah kita lakukan. Sinkronasi dan koordinasi antar OPD jadi kunci keberhasilan program,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI Farlidena Burniat mengatakan APBD Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.214.261.273.780 dan disusun berdasarkan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. “Penyerahan DPA ini menjadi dasar bagi OPD untuk segera melaksanakan kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran. Pendapatan dan belanja



Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyerahkan DPA Tahun Anggaran 2026. (Nurlis)

daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer,” kata Farlidena. Ia menambahkan, Pemkab OKI juga menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada 38 OPD guna meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat transaksi belanja. “Penerapan KKPD merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian internal,” ujarnya. Selain penyerahan DPA kepada 54 OPD, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembagian KKPD kepada 38 OPD. Adapun OPD penerima DPA terdiri atas 23 dinas, 7 badan, 2 sekretariat, 2 rumah sakit umum daerah, Inspektorat, Satpol PP dan Damkar, serta 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Nurlis)

Patuhi KLH, Walikota Bandung Serukan Partisipasi Warga Dalam Penanganan Sampah

BANDUNG, BN – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, terkait pengolahan sampah Pemerintah Kota Bandung akan menindaklanjuti arahan Menteri Lingkungan Hidup dan semua kebijakan pengelolaan sampah akan didasarkan pada data resmi dan koridor hukum yang berlaku. Farhan mencatat dan menghargai penegasan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq bahwa penggunaan insinerator mini tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan emisi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. “Pemkot Bandung mendukung penuh prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan nasional,” katanya. Untuk memberi gambaran yang jelas kepada masyarakat, secara umum mesin yang biasa disebut insinerator mini memiliki kapasitas relatif kecil, misalnya unit portabel dan rumah sakit yang berkisar puluhan kilogram per jam (contoh 10–50 kg/jam), hingga unit semi-industri atau kecil yang berkisar puluhan hingga beberapa ratus kilogram per jam (mis. 50–200 kg/jam atau 200–500 kg/jam), tergantung tipe dan produsennya.



Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. (BN)

Spesifikasi seperti ini biasanya ditemukan pada produk-produk insinerator yang dipasarkan untuk fasilitas kecil/ menengah. “Pemahaman kapasitas ini penting agar kita membedakan antara perangkat kecil yang dilarang dan fasilitas besar yang memiliki proses kontrol emisi ketat,” ucapnya. **Kondisi di Bandung: insinerator berkapasitas lebih besar** Beberapa insinerator yang saat ini dimiliki atau diupayakan di wilayah Bandung mampu mengolah sampah pada skala yang jauh di atas kategori “mini”, contoh ada fasilitas yang terukur kapasitasnya hingga lebih dari 1 ton per hari atau setara beberapa ton per hari pada operasi penuh. Namun, setiap rencana pemanfaatan teknologi pembakaran tersebut akan dikaji ketat agar memenuhi standar emisi, izin lingkungan, dan prinsip ramah lingkungan sebagaimana diamanatkan Kementerian L.H. Pemkot Bandung tidak akan menggunakan perangkat yang termasuk kategori “insinerator mini” yang dilarang.

BBWS Citanduy Perbaiki Tebing Sungai Ciseel Desa Kertahayu

CIAMIS, BN – Upaya penanganan longsor di bawah jembatan gantung penghubung Desa kertahayu, Kabupaten Cia-mis, terus dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Meski sempat terdampak bencana susulan akibat naiknya debit air Sungai Ciseel, proses perbaikan tetap dilanjutkan demi menjaga keselamatan warga di sekitar tebing sungai.

Melalui SDA Satker OP, BBWS Citanduy di bawah koordinasi PPK OP 3 bpk Ijang melakukan langkah cepat dengan pemasangan bronjong untuk menahan tebing yang longsor dan mengamankan tebing sungai ciseel . Penanganan dilakukan secara bertahap dengan mem-perhatikan kondisi alam yang dinamis di lokasi pe-kerjaan.

PPK OP 3 BBWS Citanduy, Bpk Ijang, menyampaikan bahwa naiknya debit air sempat memperlambat proses pekerjaan, namun tidak menghentikan upaya pena-nganan. “Saat debit air Sungai Ciseel naik, sempat terjadi bencana susulan yang berdampak pada area pekerjaan. Namun kami tetap melakukan perbaikan dan penguatan bronjong agar warga di sekitar tebing sungai tetap aman dan tidak terjadi kerusakan lebih parah,” ujar bpk Ijang.

Pekerjaan pemasangan bronjong tersebut dilaksana-kan oleh pengusaha muda asal Ciporoan, Ian Widianto



Tebing Sungai Ciseel Desa Kertahayu sedang diperbaiki. (asep)

wibowo dengan pengawa-san langsung dari BBWS Citanduy. Selain itu, unsur masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan guna memastikan peker-jaan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Perwakilan BPD Desa Kertahayu, Pa Endun, membenarkan adanya bencana susulan saat debit air meningkat dan meng-apresiasi ketanggapan

pihak BBWS Citanduy.

“Memang sempat terjadi bencana susulan ketika debit air naik, namun alhamdulillah pihak BBWS Citanduy dan kontraktor tetap sigap melakukan perbaikan, Kami dari BPD Kertahayu bersama warga ikut mengawasi dari awal pekerjaan langsung di lapangan,” kata Pa Endun.

Ia menegaskan bahwa tersebut yang berlokasi di du-sun Tamansari RT 12 RW 04 sangat penting bagi masya-rakat. “Kami berharap dengan penanganan yang dilaku-kan sekarang, pemukiman warga bisa lebih aman dari bencana longsor an tebing sungai meskipun debit air kem-bali naik,” tambah nya.

Masyarakat setempat pun menyampaikan harapan agar penanganan infrastruktur di kawasan rawan ben-cana terus dilakukan secara berkelanjutan. Respons cepat BBWS Citanduy dinilai mampu meminimalisir dampk bencana serta menjaga keamanan masyarakat kertahayu-Ciamis. (ASEP SUJANA)

Kasatgas Pimpin Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Utara

ASAHAN, BN- Peme-rintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Re-habilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir dan longsor sebagai forum stra-tegis untuk menyelaraskan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan pemulihan pascabencana. Rapat ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan, terutama pada pemulihan layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.

Rapat koordinasi dipim-pin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Prof. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Rakor Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Utara

Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, B.Sc., unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Peme-rintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Anggaran tersebut difokus-kan pada lima sektor prio-ritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ko-munikasi dan informatika, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabu-paten/kota, guna mem-percepat pemulihan layanan publik dan memperkuat ketahanan wilayah terdam-pak bencana.

Pemerintah Kabupaten Asahan turut mengikuti rapat koordinasi tersebut yang diikuti langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Arifin, S.Sos., M.Si. Keha-diran Bupati Asahan meru-pakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung

percepatan pemulihan pas-cabencana melalui pengu-atan koordinasi daerah, penyediaan dan pemuta-khiran data, serta pelaksa-naan kebijakan sesuai kewe-nangan pemerintah kabu-paten agar program rehabi-litasi dan rekonstruksi ber-jalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suha-ryanto menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah dicabut. Pendampingan ter-sebut mencakup penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdam-pak. Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan tanya jawab untuk mengiden-tifikasi kendala di lapangan serta merumuskan lang-kah percepatan pemulihan di daerah yang masih me-merlukan penanganan lan-jutan.

(T.P)

Perkuat Sinergi Organisasi Perempuan, DPD Wanita Pujakesuma Asahan Dilantik



Pelantikan DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Asahan masa bakti 2026–2030

ASAHAN, BN- Pelantikan DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Asahan masa bakti 2026–2030 menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Asahan dan organisasi kemasyarakatan perempuan dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan Ny. Yusnila Indriati Taufik, jajaran OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, serta pengurus Wanita Pujakesuma tingkat provinsi, sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap peran strategis organisasi perempuan.

Ketua DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten Asahan terpilih, Siti Afsah Suprianto, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2026–2030 diarahkan untuk mendorong peran aktif perempuan dalam penguatan keluarga, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pelestarian budaya. Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif pengurus serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar program organisasi dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPW Wanita Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara, HJ Chairiah Sujono Giatmo, SE, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan kehadiran seluruh pihak terkait. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan unsur organisasi menjadi modal penting dalam memperkuat peran Wanita Pujakesuma sebagai bagian dari kekuatan sosial dan budaya di daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.AP., yang juga selaku Ketua DPD Pujakesuma Kabupaten Asahan, dalam sambutannya menegaskan bahwa Wanita Pujakesuma memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, menjaga nilai budaya, serta mendorong partisipasi sosial perempuan. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan terbuka untuk bersinergi dan mendukung program-program Wanita Pujakesuma yang sejalan dengan arah pembangunan daerah, khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan, ekonomi kerakyatan, pendidikan keluarga, dan pelestarian nilai budaya lokal. (T.P)

Oknum Guru ...

Sambungan hal 7

Selanjutnya, Nissa menyatakan 1 oknum laki laki inisial S dan 1 Oknum perempuan inisial S,dan diduga kepala sekolah turut terlibat karena melakukan pembiaraan di lingkungan sekolah.

“Ya, kita sudah melaporkan bullying tersebut ke Polres Labuhanbatu, Inisial S perempuan, inisial S laki laki dan Kepala sekolahnya yang kita duga melakukan pembiaraan di sekolah tersebut,” ucap Nissa Dalimunthe.

Selanjutnya, Nissa Dalimunthe meminta atensi Dinas Pendidikan Sumatera utara untuk evaluasi sekolah serta beberapa oknum guru tersebut, “Kita meminta dinas pendidikan Sumatera Utara untuk evaluasi sekolah tersebut serta oknum guru yang melakukan pembullyan,serta memecat oknum guru tersebut,” tutup Nissa Dalimunthe. Sementara pihak SMA Negeri 1 Aek Kuo, belum berhasil dikonfirmasi BN. (m. sukma)

Bupati Bogor Gandeng ...

Sambungan hal 12

Bogor menyampaikan komitmennya untuk lebih serius meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun 2026,” katanya.

Ia melanjutkan, selain tata kelola pemerintahan, KPK bersama Pemkab Bogor juga membahas sektor strategis yang saat ini menjadi perhatian utama, yakni tata kelola pertambangan. KPK menilai permasalahan di sektor pertambangan perlu ditangani secara kolaboratif karena melibatkan banyak kewenangan lintas instansi.

“KPK akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Provinsi, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan,” ujamya.

Menurutnya, apabila aktivitas pertambangan tetap berjalan, manfaat ekonominya, khususnya dari sektor pajak dan pendapatan daerah, harus benar-benar diperhitungkan. Di sisi lain, dampak lingkungan juga harus diminimalisir karena berpotensi menimbulkan beban anggaran pemulihan di kemudian hari.

Ia menambahkan, KPK akan memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan, melakukan analisis dan identifikasi permasalahan, serta merumuskan langkah tindak lanjut bersama. KPK juga akan melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal. (eml)

Dua Perda ...

Sambungan hal 12

kapasitas sumber daya manusia serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan harga.

Tak hanya itu fungsi kelembagaan pembudi daya ikan dan petambak garam selama ini dikatakan Gubernur Khofifah belum berjalan optimal. Sehingga dengan adanya Perda ini diharapkan permasalahan yang ada bisa tertangani secara kolaboratif dan sinergis bersama para pemangku kepentingan seiring dengan berlakunya Perda. “Perda diharapkan menjadi solusi secara regulasi sekaligus payung hukum terhadap penyelesaian permasalahan dan kendala yang dialami oleh pembudi daya ikan dan petambak garam,” tuturnya.

“Termasuk kolaborasi sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam,” imbuhnya.

Selain itu, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan budi daya dan produksi garam di Indonesia, sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan harus mampu meningkatkan kesejah-teraan pembudi daya ikan dan petambak garam.

Jatim tercatat sebagai provinsi dengan produksi garam tertinggi nasional dengan total 329.102,14 ton sepanjang tahun 2025. Selain itu Produksi Perikanan Tangkap Jawa Timur tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dengan produksi 607.344,30 Ton sepanjang tahun 2025. Begitu juga produksi perikanan budi daya Jatim tercatat tertinggi ketiga nasional dengan total produksi 1.441.559,31 Ton di tahun 2025.

Hal ini turut didukung dengan angka ekspor komoditas perikanan Jatim sepanjang tahun 2025 tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dengan angka 356.476,67 Ton. “Perda ini mendukung percepatan pembangunan garam nasional pada sentra ekonomi garam rakyat di Provinsi Jawa Timur dan diharapkan bisa mendorong produksi perikanan kita agar terus meningkat,” ungkapnya.

Berikutnya Gubernur Khofifah juga menyampaikan pandangan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Perda ini adalah inisiatif Pemprov Jawa Timur, di mana pembahasannya diawali pada saat penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Jawa Timur pada Rapat Paripurna tanggal 6 Oktober 2025.

Disampaikan Khofifah, Perda diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana mengingat materi muatan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur memerlukan penyesuaian terha-dap perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan hukum dalam penye-lenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Timur. “Perubahan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara optimal dan terintegrasi,” ujamya. (dji)

KPK Ciduk ...

menyebutkan, 9 dari 15 or-ang yang ditangkap itu, termasuk Maidi, segera di-bawa ke Jakarta untuk men-jalani pemeriksaan lanjutan. Budi mengungkapkan, OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dengan modus uang jatah atau fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT ini.

Profil Wali Kota Madiun Maidi . Ia terpilih sebagai Wali Kota Madiun setelah

memenangi Pilkada Madiun pada November 2024. Maidi yang berpasangan dengan Bagus F Panuntun meraih 56 persen suara, mengalahkan dua dua pasangan calon lainnya, Bonie Laksmana-Bagus Rizki dan Inda Raya-Aldi. Dalam pilkada seren-tak 2024, pasangan Maidi-Panuntun didukung 11 par-tai politik, yaitu PSI, Nas-dem, Partai Demokrat, Ge-rindra, PKB, PKS, PAN, Prima,Gelora,PBB, dan PPP.

Sebelum terjun ke dunia politik, Maidi adalah se-orang guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada

tahun 1989 hingga awal 2000-an. Kemudian, ia men-jabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun dan terus menanjak dalam ka-riernya. Pada tahun yang sama, Maidi ditunjuk seba-gai Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, dan setahun kemudian menjadi Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun.

Maidi melanjutkan ka-riernya sebagai Kepala Di-nas Pendapatan Daerah pada tahun 2005, dan se-tahun setelahnya kembali ditunjuk sebagai Kepala Di-nas Pendidikan dan Kebu-

Sambungan hal 1

dayaan Kota Madiun. Berkat prestasinya yang gemilang, pada tahun 2009 ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun.

Setelah sembilan tahun menjabat, Maidi mencoba peruntungan dalam politik dengan maju pada pilkada 2018, di mana ia berhasil menang bersama Inda Raya. Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju sebagai calon wali kota Madiun dalam pilkada serentak 2024, dan berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun.

(sumber Kompas.com/red)

Sambungan hal. 10

dengan regulasi pusat dan sekaligus mencari alternatif pengelolaan dalam kota yang aman dan efektif, Langkah yang kami ambil (sejalan dengan arahan KLH).

Segala rencana atau perangkat pengolahan sampah yang termasuk kategori insinerator mini akan dihentikan dan tidak dioperasikan. “Kami akan berkonsultasi dan berkoor-dinasi lebih lanjut dengan Kementerian LH untuk langkah teknis yang memenuhi standar. Percepatan pengolahan di sumber: Memperkuat program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), menggenjot komposting komunitas, pemanfaatan maggot, bank sampah, dan TPST-berbasis RW agar volume yang mesti dibuang ke TPA berkurang,” paparnya.

(Zaen)

Patuhi KLH ...

“Mengapa ini penting bagi warga Bandung, kendala yang sedang kami hadapi Kota Bandung saat ini menghadapi kesenjangan antara timbulan sampah harian dan kapasitas pembuangan/olah (misalnya pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti yang mengurangi jatah pembuangan daerah), sehingga ada potensi penum-pukan pada beberapa titik. Mohon dimengerti bahwa larangan terhadap insinerator mini dari Kementerian membuat opsi pembakaran skala kecil yang pernah diper-timbangkan menjadi tidak mungkin dilanjutkan, namun hal ini kami terima sebagai bagian dari prioritas perlindungan lingkungan,” jelas Farhan.

Oleh karena itu, lanjutnya, solusi kami harus selaras

OTT BUPATI PATI, KPK SITA UANG RP 2,6 MILLIAR

❑ KPK Resmi Nyatakan Bupati Sudewo Tersangka Korupsi



Bupati Pati Sudewo

JAKARTA, BN - KPK Tangan (OTT) Bupati Pati menyita uang tunai Rp 2,6 Sudewo. “Dalam peristiwa milliar saat Operasi Tangkap tertangkap tangan ini, tim

juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Budi mengatakan Sudewo diduga terlibat jual beli jabatan. Pengisian jabatan tersebut berada di lingkup desa. “Terkait pengisian jabatan Kaur, Kasie, ataupun Sekdes (sekretaris desa),” kata Budi.

Budi menyebut Sudewo diduga mematok harga un-

tuk jabatan tertentu. Dia mengatakan harga untuk tiap jabatan berbeda-beda. “Ada (patokan harga). Jadi memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa,” kata Budi.

Sebelumnya, OTT di Pati, Jawa Tengah, dilakukan pada Senin (19/1). Sudewo sudah menjalani pemeriksaan di Polres Kudus. Dia kemudian dibawa ke Gedung KPK di Jakarta hari ini.

Budi mengatakan OTT terhadap Sudewo dilakukan

terkait dugaan jual beli jabatan di pemerintahan desa. KPK menduga Sudewo memasang harga untuk jabatan tertentu. “Jadi, memang ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa,” kata Budi.

Budi mengatakan salah satu barang bukti yang disita ialah uang miliaran rupiah. Dia belum menjelaskan dari siapa uang itu berasal. “Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan sejumlah uang

dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah, nanti kami akan sampaikan,” ujarnya.

Sudewo bersama tujuh pihak yang terjerat OTT sudah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa pagi. KPK resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo bersama 3 tersangka lainnya serta mengamankan barang bukti se-



besar Rp 2,6 miliar terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.

(*red)

REHAB ALUN-ALUN LUMAJANG Rp 3,6 M MENGECEWAKAN

❑ DLH Tutup Mulut, PPK Enggan Dikonfirmasi



Tim investigasi Media Bidik Nasional cetak dan online, pada hari Jum'at, (19/12/2025) mendatangi kantor Kadis Dra. Hertutik, M.Si. dan Sekdin Agus Rokhman Rozaq. (Son)

LUMAJANG, BN - Rehabilitasi alun-alun Lumajang, anggaran yang sangat fantastis senilai Rp. 3.606.961.500,- bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dikerjakan kontraktor pelaksana CV. Guna Bakti, dinilai oleh masyarakat mengecewakan tak sesuai harapan.

MENURUT sumber BN, domisili di sekitar alun-warga lumajang yang ber- alun sangat menyayangkan

proyek milliaran tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Dalam hitungan hari saja sudah banyak yang rusak dan tidak sesuai dengan standart kualitas dari nilai proyek tersebut.

Diduga proyek tersebut banyak dikorupsi hanya untuk memperkaya diri sendiri, bahkan pekerjaan tersebut sangat kasar, papan nama proyek pun sudah tidak ada pada tempatnya cepat-cepat diambil. Diduga kontraktor bekerja tidak profesional, akibatnya ada indikasi merugikan keuangan pemerintahan daerah, karena diduga pekerjaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

Dengan dasar temuan tersebut tim investigasi media BN, pada hari Jum'at (19/12/2025) jam 13.00

WIB, mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup Lumajang, namun Kadis DLH Dra. Hertutik, M.Si. dan Sekdin Agus Rokhman Rozaq tidak berada di tempat sedang rapat di kantor Pemkab.

Tim investigasi BN Senin (22/12/25) jam 11.30 WIB mendatangi kembali kantor Dinas Lingkungan Hidup Lumajang untuk kedua kalinya, Kadis DLH Dra. Hertutik, M.Si. dan Sekdin Agus Rokhman Rozaq, juga tidak ada di tempat sedang rapat di Pemkab.

Bahkan Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak mau dikonfirmasi terkait rehabilitasi Alun-alun. Kata Kabid yang bisa memberikan keterangan harus Kadis DLH dan Sekdin. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi

dari Kadis DLH.

Ketua Laskar Merah Putih Kab. Lumajang Muhammad Nurul Huda mengamat dan mendengarkan keluhan warga Lumajang terkait rehabilitasi alun-alun, menyoroti kasus ini kuat dugaan ada permainan proyek/anggaran, apalagi proyek tersebut papan namanya cepat-cepat diambil dan pekerjaan proyek tidak sesuai juga banyak yang rusak.

Dikatakan Huda temuan ini harus ditindaklanjuti jika ada dugaan indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang/APH harus mengambil langkah hukum, masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran tersebut dikelola, untuk informasi tersebut harus diawasi terus menerus secara ketat untuk memastikan



Pekerjaan CV. Guna Bakti, banyak yang rusak dan terlihat acak-acakan.

kualitas pekerjaan sesuai dengan standart yang ditetapkan, “Ini menjadi pe-ningkat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan ang-

garan tersebut, langkah tegas diharap mampu menjawab keresahan masyarakat.” tegas ketua LMP Huda. (SON/Bersambung Edisi Berikutnya)

Bupati Gandeng KPK Dampingi Pemkab Bogor Jalankan Sejumlah Program Strategis

BOGOR, BN - Bupati Bogor, Rudy Susmanto meng-gandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menjalankan sejumlah program strategis daerah. Hal ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik KKN.

Hal tersebut diungkapkan Rudy Susmanto usai kegiatan Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2026 serta Pembahasan Alih Fungsi Lahan dan Pertambangan di Kabupaten Bogor, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (20/1/2026).

Hadir Direktur Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Kepala Satgas Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, PIC KPK Wilayah Jawa Barat, dan jajaran tim KPK RI. Acara diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para asisten dan staf ahli, Inspektur, jajaran kepala perangkat daerah, direktur RSUD, pimpinan BUMD, serta para Camat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam membuka lembaran baru tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap beberapa program strategis. Ini adalah bagian dari evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami, sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang,” ujar Rudy.



Bupati Bogor Rudy Susmanto (tengah). (eml)

Menurut Rudy, pendampingan KPK diperlukan agar setiap kebijakan dan program strategis yang dijalankan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Pembahasan terkait sektor pertambangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok hari,” kata Rudy.

Rudy menjelaskan, selain sektor pertambangan, Pemkab Bogor juga meminta pendampingan KPK terhadap sejumlah proyek strategis, diantaranya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur-Leuwiliang, serta beberapa program strategis lainnya yang akan dikaji lebih lanjut.

“Pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor,” jelas Rudy.

Bupati Rudy menegaskan, ini adalah wujud komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pemerintahan yang sehat dan transparan. Kami ingin memastikan seluruh langkah pembangunan dikawal secara terbuka dan akuntabel.

Direktur Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi peningkatan pengelolaan integritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang pada tahun 2025 mencapai skor 73,8. Peningkatan tersebut dinilai sebagai hasil

perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

“Pada pertemuan hari ini kami melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan tahun 2025. Salah satu capaian positifnya adalah skor pengelolaan integritas Kabupaten Bogor yang meningkat menjadi 73,8,” ujarnya.

Bahtiar mengatakan, KPK juga menyoroti delapan area tata kelola pemerintahan. Pada tahun ini, sejumlah pemerintah daerah di Indonesia diketahui mengalami penurunan kinerja di beberapa area, terutama pada pengadaan barang dan jasa, perencanaan, serta penganggaran.

“KPK mencatat adanya komitmen kuat dari Bupati Bogor untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam forum supervisi, Bupati

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Dua Perda Strategis Disahkan Gubernur dan Pimpinan DPRD Jatim

SURABAYA, BN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim resmi mengesahkan dua Peraturan Daerah (Perda) strategis dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (19/1).

Kedua Perda yang dimaksud yakni Perda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam serta Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur

Setelah dilakukan penyampaian pendapat akhir, Gubernur Khofifah bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Jatim melakukan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama dua Perda yang telah disepakati 9 fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur.

Disampaikan Khofifah, untuk Perda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam digodok untuk melindungi dan memperjuangkan pemberdayaan pembudi daya ikan dan petambak garam di Jatim.

Sejauh ini dikatakan Khofifah memang ada sejumlah permasalahan dan kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas dan mutu produk, rendahnya

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Gubernur Khofifah saat menandatangani dua perda yang disahkan (foto: istimewa/BN)